Wawasan Ilmu

DUMMY BUKU

Nahdaltul Ulama dan Fikih Peradaban

(Menanamkan Islam Rahmatan Lil'Alamin Berbasis Pancasila Di Pondok Pesantren)









Disusun Oleh

SARTONO

AHMAD ZULFI FAHMI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 ten- tang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupa- kan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk. Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang dituju- kan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait ha- nya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai ba- han ajar; dan
d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengem- bangan ilmu pengetahuan yang memungkin kan suatu Cip- taan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lemba- ga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelang- garan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dip- idana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (se- ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelangga- ran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pi- dana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta ru- piah).

Dummy Book CV. Wawasan Ilmu

Sartono, S.Pd,I., M.Pd.I
Ahmad Zulfi Fahmi. S.Pd., M.Pd.I

Dummy Book Cv. Wawasan Ilmu

NAHDLATUL ULAMA DAN FIKIH PERADABAN :

(Menanamkan Islam Rahmatan Lil'Alamin Berbasis Pancasila)

WAWASANILMU

NAHDLATUL ULAMA DAN FIKIH PERADABAN :

(Menanamkan Islam Rahmatan Lil'Alamin Berbasis Pancasila)

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Halaman: xiv + 136

Penulis:
Sartono, S.Pd.I., M.Pd.I
Ahmad Zulfi Fahmi, S.Pd., M.Pd.

Penerbit
Wawasan Ilmu

Anggota IKAPI (215/JTE/2021)
Leler RT 002 RW 006 Desa Kaliwedi Kec. Kebasen Kab. Banyumas Jawa Tengah 53172
Email : redaksi@wawasanilmu.co.id
Web : https://wawasanilmu.co.id/

ISBN :

All Right Reserved

Hak Cipta pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dummy Book Cv. Wawasan Ilmu

KATA PENGANTAR

Dummy Book Cv Wawasan Ilmu

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dengan judul "Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Rahmatan Lil`Alamin Berdasarkan Pancasila di Pondok Pesantren melalui Tradisi Halaqah Fikih Peradaban" dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini lahir dari semangat untuk mengkaji peran strategis Nahdlatul Ulama (NU), khususnya Pengurus Besar NU, dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil`alamin dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki kontribusi besar dalam membangun harmoni antara agama dan negara, khususnya melalui peran pondok pesantren yang menjadi basis pendidikan Islam dan transformasi nilai-nilai kebangsaan.

Tradisi halaqah fikih peradaban yang menjadi fokus pembahasan dalam buku ini adalah salah satu bentuk pendekatan khas NU dalam membumikan nilai-nilai Islam yang inklusif, toleran, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Halaqah ini tidak hanya menjadi ruang diskusi ilmiah, tetapi juga menjadi wadah bagi para ulama, santri, dan masyarakat untuk memahami bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan secara kontekstual tanpa kehilangan esensinya.

Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi akademik secara teoritis sekaligus praktis dalam memahami peran NU dan tradisi pesantren dalam menjaga keutuhan bangsa dan menguatkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, santri, ulama, dan masyarakat umum yang ingin mendalami hubungan harmonis antara Islam dan kebangsaan, khususnya dalam konteks Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam membangun peradaban yang damai, toleran, dan penuh keberkahan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Banjar, Desember 2024
Penulis,

Sartono, S.Pd,I. M.Pd.I.
Ahmad Zulfi Fahmi, S.Pd.I., M.Pd.I

Dummy Book CV. Nawasena Ilmu

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul *"Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Rahmatan lil 'Alamin Berdasarkan Pancasila di Pondok Pesantren Melalui Tradisi Halaqah Fiqih Peradaban."*

Penulisan ini dilakukan sebagai upaya untuk menggali lebih dalam peran strategis organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam membangun pemahaman Islam yang ramah, inklusif, dan relevan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, yang berlandaskan Pancasila. Melalui Tradisi halaqah Fikih Peradaban sebagai salah satu pendekatan kultural dan pendidikan di pondok pesantren yang memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang memiliki wawasan keislaman moderat sekaligus kecintaan terhadap tanah air.

Tujuan Penulisan Buku meliputi :

1. Menggali Peran Nahdlatul Ulama dalam Konteks Keindonesiaan, Buku ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia berperan dalam menanamkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin yang sejalan dengan Pancasila, khususnya melalui pesantren sebagai pusat pendidikan Islam.
2. Mengenalkan Konsep Fikih Peradaban, Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mendalami konsep fikih peradaban, yaitu pendekatan keislaman yang

mengedepankan harmoni, toleransi, dan relevansi dengan tantangan zaman.

3. Menjelaskan Peran Pesantren sebagai Pilar Pendidikan Islam
   Buku ini mengupas bagaimana pesantren menjadi institusi strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan melalui tradisi intelektual seperti halaqah, musyawarah, dan diskusi ilmiah.

Manfaat dari buku ini diharapkan dapat:

1. Sebagai Panduan Pemikiran Keagamaan
   Buku ini memberikan wawasan tentang pendekatan NU dalam menafsirkan Islam secara moderat dan kontekstual melalui fikih peradaban, sehingga dapat menjadi panduan dalam mengatasi berbagai tantangan keagamaan di era modern.
2. Memperkuat Pemahaman Nilai-Nilai Kebangsaan
   Buku ini bermanfaat dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang hubungan harmonis antara ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
3. Meningkatkan Peran Pesantren dalam Pembangunan Peradaban
   Buku ini menjadi motivasi bagi pesantren untuk terus memainkan peran penting sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan umat, dan penjaga nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat

Banjar, Desember 2024
Penulis,

Sartono, S.Pd,I. M.Pd.I.
Ahmad Zulfi Fahmi, S.Pd.I., M.Pd.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

PRAKATA.....vii

DAFTAR ISI ix

BAB I
PENDAHULUAN 1

BAB II
PERAN DAN KONTRIBUSI NAHLATUL ULAMA 5

A. Peran Dan Kontribusi Nahlatul Ulama 5

B. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama 7

C. Tujuan, Visi, Dan Misi Nahdlatul Ulama 11

D. Perkembangan Dan Kontribusi Nu Dalam Sejarah Indonesia 12

E. Peran Nahdlatul Ulama dalam Berbangsa dan Bernegara 15

BAB III
PENERAPAN NILAI-NILAI RAHMATAN
LIL ALAMIN.....18

A. Hakikat dan Esensi Rahmatan Lilalamin Untuk Seluruh Alam .20

B. Prinsip-Prinsip Rahmatan Lil Alamin untuk Seluruh Alam 24

C. Nilai-Nilai Islam Rahman Lil Alamin 31

D. Penerapan Nilai-Nilai Rahmatan Lil Alamin dalam kehidupan .37

BAB IV
PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 39

A. Pancasila Sebagai Landasan dalam kehidupan bermasyarakat .. 39
B. Tantangan dan Makna Esensi Pancasila 41
C. Pancasila sebagai Landasan Ideologi Bangsa Indonesia 44
D. Pancasila sebagai Dasar Kehidupan Bernegara 46
E. Pancasila sebagai Peneguh Kebhinekaan 48
F. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa 49
G. Nilai Luhur Pancasila Sebagai Solusi Menghadapi Permasalahan Bangsa 50

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN PONDOK PESANTREN 54

A. Sistem Pengelolaan Manajemen Pesantren 54
B. Manajer Pesantren dan Kekuasaannya 55
C. Strategi Kepemimpinan Pesantren. 56
D. Peran Pesantren Dalam Proses Pembangunan Sosial 58
E. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Pondok Pesantren 60
F. Personalia Manajemen Pesantren 61
G. Model Kepemimpinan Pesantren 62
H. Pondok Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Islam 65

BAB VI
TENTANG PERENCANAAN STRATEGIS DI PONDOK PESANTREN 66

A. Halaqah Fikih Peradaban Di Pondok Pesantren Sebagai

Pusat Pembaruan Pemikiran Islam..... 66

B. Halaqah Fikih Peradaban Di Lingkungan Pesantren. 68

C. Halaqah Fikih Peradaban Dalam Konteks KeIndonesiaan 71

D. Halaqah Fikih Peradaban sebagai Wadah NU Menanggapi Isu-Isu Kontemporer 74

BAB VII
PERAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ISLAM RAHMATAN LIL`ALAMIN BERDASARKAN PANCASILA DI PONDOK PESANTREN 61

A. Membangun Karakter Nilai-Nilai Islam Rahmatan lil 'Alamin melalui kasih sayang, damai dalam pertentangan dan menjalin kerukunan 77

B. Penerapan Tradisi Halaqah Fiqih Peradaban Dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama 84

C. Aplikasi pengokohan Trilogi Ukhuwah (Islamiyah, Wathaniyah, Basyariyah) dalam berbangsa dan bernegara..... 88

D. Menyiarkan dakwah Islam yang Toleran Melalui Halaqah Fikih Peradaban 91

E. Menyiarkan dakwah Islam yang Toleran Melalui Halaqah Fikih Peradaban 94

BAB VIII
PENERAPAN HALAQAH FIKIH PERADABAN 103

A. Tradisi Halaqoh Fiqh Peradaban dilingkungan Pesantren..... 103

B. Penerapan Halaqah Fiqh Peradaban PBNU 107

C. Penerapan Nilai Nilai Moderasi Agama dalam Halaqoh Kebangsaan 109

DAFTAR PUSTAKA 113

PROFIL PENULIS.....116

BAB I
PENDAHULUAN

Dimulai dari peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam mengenalkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin berdasarkan Pancasila di Pondok Pesantren melalui praktik tradisional halaqah fiqih peradaban, saat ini menjadi suatu hal yang krusial untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin berdasarkan Pancasila tetap terjaga. Peran kunci Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menanamkan nilai-nilai tersebut di Pondok Pesantren melibatkan tradisi halaqah fiqih peradaban dan mencakup berbagai aspek, seperti organisasional, pendidikan, dan sosial di dalam Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Beberapa peran PBNU dalam konteks tersebut dapat melakukan berbagai program kegiatan seperti penyelenggaraan program Pendidikan Islam, dimana PBNU dapat memastikan bahwa nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alamin*, yang mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan kedamaian, diterapkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya PBNU dapat melakukan pengembangan kurikulum yang berbasis Pancasila, artinya PBNU dapat berperan dalam merancang kurikulum pendidikan Pesantren yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dan Pesantren dapat menyelaraskan pengajaran agama Islam dengan norma-norma kebangsaan akan membantu membentuk generasi santri yang mengerti dan mengamalkan Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan tradisi *halaqah* fiqih peradaban, adalah forum diskusi keagamaan yang dapat digunakan untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam *rahmatan lil'alamin*. PBNU dapat

mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan *halaqah* fiqih peradaban di berbagai Pesantren untuk mendiskusikan bagaimana ajaran Islam dapat berperan dalam membangun peradaban yang adil, harmonis,dan bermanfaat. Dalam hal pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan, PBNU dapat memberdayakan santri dengan keterampilan sosial dan kepemimpinan melalui pelatihan dan program yang mengedepankan nilai- nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, santri tidak hanya menjadi pemahami ajaran agama, tetapi juga menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat sesuai dengan prinsip Islam *rahmatan lil'alamin.*

Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan pemahaman keislaman yang inklusif, PBNU dapat mempromosikan pemahaman keislaman yang inklusif dan menghormati perbedaan antar umat Islam dan antara umat beragama. Melalui *halaqah* fiqih peradaban, PBNU dapat membimbing santri agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang Islam sebagai agama rahmat untuk seluruh alam semesta. Sedangkan melalui integrasi nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alamin* berdasarkan Pancasila di pondok pesantren, PBNU dapat memainkan peran penting dalam membentuk generasi muslim yang berkualitas, berkontribusi positif dalam masyarakat, dan memperkuat keberagaman dalam bingkai kebangsaan Indonesia.

Pandangan tentang konsep "*rahmatan lil alamin*" adalah konsep dalam Islam yang berarti "rahmat untuk semua alam" atau "rahmat bagi seluruh alam semesta." Nilai-nilai Islam yang dipegang teguh dengan prinsip *rahmatan lil alamin* mencakup berbagai aspek kehidupan, moral, sosial, dan spiritual. Beberapa nilai utama yang mewakili konsep *rahmatan lil`alamin* dalam Islam antara lain seperti keadilan (adil), dimana keadilan merupakan prinsip dasar dalam Islam. Allah menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap semua individu, tanpa memandang suku, agama, atau status soaial (Ahyani dkk., 2021). Kemanusiaan (*insaniyah*) dalam Islam, juga mengajarkan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan kasih sayang, belas

kasihan, dan hormat. Solidaritas dan kepedulian terhadap kebutuhan sesama manusia juga ditekankan.

Sementara dalam konsep keteladanan (*uswah hasanah*), Islam menyerukan agar umatnya menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari- hari. Rasulullah Muhammad SAW dianggap sebagai contoh teladan yang harusdiikuti oleh umat Islam. Dalam hal lain seperti ketoleranan (*tasamuh*), Islam mendorong umatnya untuk bersikap toleran terhadap perbedaan suku, agama, dan budaya (Toha dkk., 2021). Sehingga sikap saling menghormati hak-hak individu dan keberagaman merupakan bagian integral dari nilai-nilai Islam (Gunawan dkk., 2021).

Dalam rangka menjaga keseimbangan (*wasatiyah*), Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup, termasuk dalam aspek ibadah, pekerjaan, dan interaksi sosial. Umat Islam diajak untuk menghindari ekstremisme dan fanatisme. Sementara dalam Islam berkaitan dengan keamanan (aman), memandang keamanan sebagai salah satu tujuan utama masyarakat. Keamanan fisik, mental, dan sosial dihargai sebagai bentuk rahmat bagi seluruh umat manusia. Dan yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan kebersihan (*taharah*), dimana Islam menekankan pentingnya kebersihan, baik secara fisik maupun spiritual. Ritual ibadah, seperti shalat, juga melibatkan aspek kebersihan. Semisal di salah satu Pondok Pesantren di provinsi Jawa Barat berkaitan dengan tingkat kesehatan lingkungan diperlukan sanitasi pesantren (Sumantri dkk., 2024).

Kesejahteraan (*maslahah*), dalam Islam memandang kesejahteraan umat manusia sebagai tujuan penting. Segala tindakan yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi individu dan masyarakat dianjurkan (Ahyani dkk., 2023). Lebih lanjut dalam rangka sebagai ijtihad Ulama dalam rangka menyiapkan SDM yang unggul dalam menghadapi era globalisasi di dalam Pesantren, maka diperlukan tradisi keilmuan Pesantren, salah satunya dengan Menjaga tradisi *halaqah*. Dimana *halaqah* adalah istilah arab yang merujuk pada suatu pertemuan atau majelis di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas, belajar, dan mendiskusikan berbagai aspek kehidupan, terutama yang

berkaitan dengan agama Islam.

Tradisi *halaqah* merupakan bagian integral dari budaya dan praktik keislaman, dan seringkali mencakup berbagai kegiatan dan tujuan. Pentingnya halaqah tersebut salah satu tujuannya adalah sebagai pengembangan khazanah bercirikan khas milik Pesantren di Indonesia.Salah satu program kerja ormas terbesar di dunia dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama (NU) di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf yakni salah satunya menyelenggarakan *halaqoh* fiqih peradaban yang ditergetkan di 250 titik, yang tersebar di berbagai pesantren seluruh Indonesia. Sementara di provinsi Jawa Barat, berikut daftar kegiatan tradisi halaqah di Pesantren yang sudah berjalan meliputi :

1. Halaqah Fiqih Peradaban di Pesantren Luhur Daarul Uluum Bogor tahun 2023 membahas tentang bagaimana mempersiapkan SDM yang unggul di era globalisasi melalui penguatan Iman, Islam, dan Ihsan (Saputra, 2023).

2. Halaqah Fikih Peradaban II di Pondok Pesantren Darussalam Rajapolah Tasikmalaya tahun 2023 membahas tentang bagaimana mengungkap Fiqh secara kontekstual kekinian (Tasikmalaya, 2023).

3. Halaqah Fikih Peradaban II yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Munawwar Jarnauziyah Pasir Bokor, Kota Tasikmalaya tahun 2023. Halaqah tersebut bertujuan untuk merespon para kiyai di daerah terkait permasalahan umat manusia di daerah tentang pentingnya makna peradaban dan perdamaian (Obech, 2023).

4. Halaqoh Fiqih Peradaban di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo kota Banjar tahun 2023, membahas tentang fiqih, dan bagaimana mengontekstualkannya, serta membedah ajaran-ajaran lama kemudian diejewantahkan dalam peradaban masa depan yang lebih baik (Fadilah & Iqbal, 2023).

BAB II
PERAN DAN KONTRIBUSI NAHLATUL ULAMA

A. Peran dan Kontribusi Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Meskipun tidak ada data pasti mengenai jumlah anggota NU, sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2023 Menurut Ketua Umum Nahdlatul Ulama "berdasarkan survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia, sebanyak 56,9 persen penduduk Indonesia mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU). Jika jumlah penduduk Indonesia mencapai 280 juta, Anda dapat menghitung sendiri bahwa angka tersebut setara dengan sekitar 159,3 juta orang"(Malik Ibnu Zaman , 2023)

Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama (NU) berperan sebagai wadah perjuangan untuk melawan segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari kolonial Belanda dan Jepang. Selain itu, NU juga aktif dalam kegiatan dakwah untuk menjaga persatuan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran besar NU dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan NKRI dapat dipahami melalui latar belakang berdirinya organisasi ini pada 31 Januari 1926. Setidaknya ada tiga alasan utama yang melatarbelakangi kelahiran NU, yaitu:((1) Motivasi agama (2) Upaya mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah, dan (3) Semangat nasionalisme.

Motivasi nasionalisme tercermin dari tujuan NU untuk menyatukan para ulama dan tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat kebangsaan ini bahkan terlihat dalam nama Nahdlatul Ulama, yang berarti "Kebangkitan Para Ulama." Di bawah kepemimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, NU menunjukkan sikap nasionalis yang kuat. Sebelum Indonesia merdeka, banyak pemuda mendirikan organisasi kedaerahan seperti Jong Celebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Sumatera. Namun, para kiai NU memilih mendirikan organisasi pemuda yang bersifat nasionalis. Pada tahun 1924, para pemuda pesantren mendirikan Shubban al-Wathan (Pemuda Tanah Air), yang kemudian menjadi cikal bakal organisasi Ansor Nahdlatul Ulama (ANO). Salah satu tokoh penting dalam organisasi ini adalah Kiai Muhammad Yusuf Hasyim.(Farih, 2016)

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kontribusi besar dalam membangun bangsa Indonesia, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Salah satu kontribusi paling bersejarah adalah perannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui *Resolusi Jihad* pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini menjadi seruan untuk umat Islam melawan penjajah demi mempertahankan kedaulatan bangsa, yang menjadi cikal bakal Hari PahlawanBerikut adalah beberapa kontribusi penting Nahdlatul Ulama (NU) dalam berbagai aspek kehidupan: (1) Perjuangan Kemerdekaan Indonesia: NU berperan aktif dalam melawan penjajahan Belanda dan Jepang, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh NU pada tahun 1945 menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam membangkitkan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. (2) Pendidikan dan Dakwah: NU mendirikan dan mengembangkan ribuan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan berbasis Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Pesantren-pesantren NU telah mencetak banyak tokoh intelektual Muslim yang berkontribusi pada

pembangunan bangsa (3) Nilai-Nilai Kebangsaan: NU mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan secara aktif mempromosikan Islam yang ramah, inklusif, dan moderat. Dalam sejarah perumusan Pancasila, para ulama NU juga turut serta memastikan bahwa nilai-nilai Islam dan kebangsaan dapat berjalan harmonis(4) Kesejahteraan Sosial: Melalui lembaga-lembaga seperti NU Peduli, NU membantu masyarakat terdampak bencana, mendukung program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini mencerminkan peran NU dalam meringankan kesenjangan sosial di Indonesia (5) Keterlibatan Global: NU kini aktif di tingkat internasional dengan membawa misi Islam rahmatan lil'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Organisasi ini mempromosikan perdamaian dunia, toleransi antaragama, dan penolakan terhadap radikalisme

.

B. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama

Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, bukan melalui kekuatan militer. Sebagai pedagang, mereka terbiasa dengan proses tawar-menawar, yang tidak hanya terkait dengan harga barang, tetapi juga dalam pendekatan dakwah kepada masyarakat setempat. Para muballigh pada masa itu memahami pentingnya menghargai tradisi lokal, seperti sesaji, selamatan, dan berbagai ritual lainnya, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya di Jawa.

Jika tradisi-tradisi tersebut ditolak secara langsung, kemungkinan besar masyarakat akan sulit menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, para muballigh memilih pendekatan kompromi. Tradisi tetap dijalankan, tetapi maknanya diubah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, nasi yang sebelumnya digunakan sebagai sesaji dialihkan menjadi bagian dari sedekah kepada masyarakat, yang merupakan ajaran Islam. Mantra-mantra untuk mendoakan orang yang telah meninggal digantikan dengan doa-doa yang bersumber

dari Al-Qur'an dan Hadis. Ziarah kubur yang sebelumnya bertujuan meminta berkah kepada roh leluhur diubah menjadi ziarah untuk mendoakan orang yang telah wafat.Inilah gambaran ringkas pola kehidupan sosial beragama masyarakat pada masa awal Islam masuk ke Indonesia. Pendekatan adaptif ini juga menjadi salah satu latar belakang berdirinya jam'iyah Nahdlatul Ulama.(Machali & Fauzi, 2020)

NU didirikan di Surabaya pada tahun 1926 oleh para ulama tradisional dan sejumlah pengusaha. Organisasi ini lahir di tengah kondisi bangsa Indonesia yang mengalami keterpurukan, baik secara mental maupun ekonomi, akibat penjajahan dan tekanan tradisi yang membelenggu. Situasi ini mendorong kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui pendidikan dan pembentukan organisasi.

Gelombang pertama gerakan kebangkitan nasional muncul pada tahun 1908 dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, yang menjadi tonggak perjuangan bangsa untuk memperjuangkan hak dan martabatnya. Gerakan ini menandai era Kebangkitan Nasional. Setelah Budi Utomo, semangat perjuangan menyebar luas, terutama setelah masyarakat pribumi menyadari penderitaan dan ketertinggalan mereka dibandingkan bangsa lain. Sebagai respons atas situasi tersebut, berbagai organisasi pendidikan dan perjuangan bermunculan.

NU hadir sebagai kelanjutan dari gerakan-gerakan tersebut. Berdirinya NU didasari oleh tiga alasan utama. Pertama, alasan lokal sebagai reaksi defensif terhadap aktivitas kelompok reformis seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Kedua, menurut Alfian, NU dibentuk untuk menyediakan wadah bagi umat Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i, mayoritas di antaranya tinggal di pedesaan. Alasan ini menunjukkan bahwa NU juga muncul sebagai respons terhadap perkembangan politik di kalangan umat Islam. NU juga memberikan ruang bagi artikulasi politik

masyarakat pesantren dan komunitas Muslim tradisional di pedesaan, memungkinkan mereka berpartisipasi dalam urusan politik yang lebih luas.

Selain itu, alasan internasional turut menjadi pendorong berdirinya NU. Munculnya gerakan modernis di tingkat global, yang dipelopori oleh kelompok Pan-Islamisme, menjadi tantangan besar. Setelah runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani, yang sebelumnya melindungi dan mendukung para ulama tradisional, kelompok Pan-Islamisme mulai mengambil alih peran dalam pemerintahan. Dengan sudut pandang yang berbeda dari para ulama tradisional, kelompok ini sering meminggirkan mereka yang tidak sejalan.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan ulama tradisional, terutama setelah kelompok modernis mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu faktor utama berdirinya NU. Langkah awalnya adalah pembentukan Komite Hijaz, yang dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah. Komite ini bersifat sementara dan dirancang untuk mempersiapkan utusan yang akan menghadiri Kongres Umat Islam di Mekkah. Namun, setelah melakukan koordinasi dengan berbagai kiai, tercapai kesepakatan untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926).

Berdasarkan hal ini, KH. A. Wahab Hasbullah mengadakan pertemuan dengan kalangan pesantren, yang kemudian melahirkan pembentukan Komite Hijaz dalam sebuah rapat di Surabaya pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H. Dalam kesempatan yang sama, juga didirikan organisasi bernama Nahdlatoel Oelama (NO). KH. R. Asnawi dari Kudus tidak dapat berangkat ke Mekkah karena terlambat memesan tiket kapal, sehingga yang berangkat adalah KH. A. Wahab Hasbullah dan Syaikh Ghonaim Al-Misri. Baru pada tahun 1928, utusan dari NU berhasil

diterima oleh Ibnu Saud. Mereka meminta agar raja dan pemimpin Wahhabi menghormati praktik-praktik mazhab, yang disambut baik dengan syarat bahwa praktik tersebut tetap harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.(Nur Khalik & Ali, 2023)

Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk mempertegas prinsip dasar NU, KH. Hasyim Asy'ari menyusun dua kitab penting: Qanun Asasi (prinsip dasar organisasi) dan I'tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Kedua kitab ini menjadi landasan utama NU, yang kemudian diimplementasikan dalam Khittah NU sebagai pedoman warga NU dalam berpikir dan bertindak di bidang sosial.(Chalik, 2011)

Berdirinya NU tidak lepas dari Pendiri utama Nahdlatul Ulama (NU) adalah KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. KH. Hasyim Asy'ari berperan sebagai sumber legitimasi dalam pembentukan organisasi ini sekaligus menjadi Rais Akbar pertama. Sementara itu, KH. Wahab Hasbullah berperan sebagai inspirator, penggerak utama, dan fasilitator dalam proses pendirian NU. Kekuatan keduanya semakin solid dengan dukungan para kiai terkemuka lainnya yang berkumpul di rumah KH. Wahab di Kertopaten, Surabaya, pada 31 Januari 1926, untuk menyepakati pendirian organisasi Nahdlatul Ulama. Para kiai yang menjadi pendiri NU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL
1	K.H. Muhammad Hasyim Asy`ari	Jombang
2	K.H. Abdul Wahab Hashbullah	Surabaya
3	K.H. Bisri Syamsuri	Jombang
4	K.H. Raden Haji Asnawi	Kudus
5	K.H. Ma`sum	Lasem
6	K.H. Ridwan	Semarang
7	K.H. Nawawi	Pasuruan
8	K.H. Nahrowi	Malang

9	K.H. Ridwan	Surabaya
10	K.H. Alwi Abdul Aziz	Malang
11	K. Abdullah Ubaid	Surabaya
12	K.H. Abdul Halim	Cirebon
13	K.H. Doro Munthaha	Madura
14	K.H. Dahlan `Abdulqahar	Kertosono
15	K.H. Abdullah Faqih	Gresik

C. Tujuan, Visi, dan Misi Nahdlatul Ulama

Tujuan pendirian NU adalah untuk menjaga, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah* dengan mengikuti salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Selain itu, NU bertujuan menyatukan langkah para ulama dan pengikutnya serta menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan peningkatan harkat serta martabat manusia.

Salain itu Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU bertujuan membangun masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin (rahmat bagi seluruh alam) yang mengedepankan moderasi, toleransi, dan kemaslahatan bersama. Dengan pendekatan yang kontekstual, NU berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan realitas sosial, sehingga Islam dapat menjadi pedoman hidup yang relevan di tengah perkembangan zaman.

Visi NU adalah menjadi wadah perjuangan ulama dan pengikutnya yang bergerak di bidang agama dan sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan *Khaira Ummah* (umat terbaik).Visi ini mencerminkan NU sebagai organisasi yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan agama, sosial, dan kebangsaan, sekaligus menekankan pentingnya harmoni dalam keberagaman.

Misi NU meliputi beberapa bidang:

1. Bidang agama: Mengupayakan pelaksanaan ajaran Islam berlandaskan *Ahlussunnah wal Jama'ah* sesuai salah satu mazhab empat melalui dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*.
2. Bidang pendidikan: Menyelenggarakan pendidikan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan berbasis ajaran Islam, dengan tujuan membentuk umat Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, terampil, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
3. Bidang sosial: Berusaha mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Bidang ekonomi: Mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan merata, dengan memberi prioritas pada pengembangan ekonomi kerakyatan.
5. Bidang usaha lain: Mengembangkan berbagai upaya yang bermanfaat bagi masyarakat luas guna mewujudkan *Khaira Ummah*.

Semua visi dan misi ini bertujuan memperkuat dan mewujudkan *jam'iyyah Aswaja* sebagai komunitas umat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera.(Hambali, 2018) Misi-misi tersebut menjadi panduan NU dalam menjalankan perannya sebagai organisasi keagamaan dan sosial yang mendukung harmoni dan kemajuan bangsa Upaya dari visi dan misi ini adalah untuk memperkuat dan mewujudkan jamiyyah Aswaja bagi umat masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera di tengah- Upaya dari visi dan misi ini adalah untuk memperkuat dan mewujudkan jamiyyah Aswaja bagi umat masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera di tengah-

D. Perkembangan dan Kontribusi NU Dalam Sejarah Indonesia

Mengacu pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim: *Khoirunnas Anfa'uhum Linnas* (Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain), sejak didirikan pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan kepentingan

masyarakat sebagai fokus utama gerakannya. Cita-cita ini dirumuskan secara sistematis dalam *Mabadi' Khaira Ummah*, yaitu prinsip-prinsip untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang ideal dan terbaik. Prinsip ini berlandaskan perintah Allah dalam Al-Qur'an (3:110): "Jadilah kamu sebaik-baik umat..." yang mendorong semangat untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain, bukan sekadar mengambil manfaat. Hal ini menekankan pentingnya memberikan kontribusi kepada sesama, bukan semata-mata berharap bantuan dari orang lain.(Abdullah & Rahman, 2024)

Nahdlatul Ulama (NU) dalam setiap langkahnya selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berlandaskan syariat Islam serta nilai-nilai keislaman yang sejalan dengan semangat ke-Indonesiaan dan nasionalisme. Hal ini tercermin dalam latar belakang berdirinya NU, perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan usahanya menjaga keutuhan NKRI. Di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari, NU menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme yang berlandaskan pada ajaran Islam sesuai dengan *Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah*.

Peran NU pada masa penjajahan Belanda terlihat dalam keputusan Muktamar ke-2 di Banjarmasin tahun 1936, yang menyatakan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) berstatus sebagai *Dār al-Salām*. Keputusan ini menunjukkan komitmen NU terhadap tanah air, meskipun hukum yang berlaku saat itu tidak berbasis Islam. Bagi NU, yang terpenting adalah umat Islam dapat menjalankan syariat agamanya secara bebas dan aman.

Menurut NU, perjuangan jihad para ulama melawan penjajahan Belanda merupakan implementasi ajaran Islam yang wajib dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Jihad yang dilakukan oleh para ulama dan santri adalah jihad untuk membela tanah air, yang dimaknai sebagai bentuk cinta tanah air (*ḥubb al-waṭan*) dan bagian dari *jihād fī sabīlillāh*. Dalam pandangan hukum Islam, upaya

mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia adalah kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam.(Farih, 2016)

Setelah meraih kemerdekaan semua tidaklah mudah dan tenang, tantangan dan hambatan terus ada dan menyelimuti setiap rakyat Indonesia. Berbicara tentang perjuangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengawal kemerdekaan Indonesia ada salah satu tokoh yang menjadi pahlawan nasional yang disebut sebagai Rais Akbar Jammiyah NU yaitu Hadratus Syekh KH Hasyim Asy Ari sang pendiri NU dari Jombang Jawa Timur itu. KH Hasyim Asy'ari sebagai sosok sentral perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Sebagai salah satu gerakannya adalah Resolusi Jihad NU pada oktober 1945. Dengan tegas beliau menyuarakan tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hingga akhirnya muncul kaidah yang disuarakan dengan Hubbul Wathan Minal Iman (mencintai Tanah Air adalah bagian dari iman). Fatwa atau resolusi jihad KH Hasyim Asy'ri berisi lima butir. Seperti tertulis dalam Biografi Kiai Hasyim Asyari. Butir pertama Resolusi Jihad berbunyi; kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Kedua; Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Ketiga; musuh republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Keempat; umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali, dan kelima; kewajiban ini merupakan perang suci (jihad) dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 kilo meter, sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang.

NU, melalui para tokohnya, memberikan kontribusi besar dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kiai Masykur menceritakan bahwa pada akhir Mei 1945 terjadi diskusi panjang antara Soekarno, Mohammad Yamin, Kiai Wahid Hasyim (perwakilan NU), Kiai Kahar Muzakkir (Partai Islam Indonesia), dan dirinya sendiri. Dari diskusi tersebut, terlihat bahwa para pemimpin Islam Indonesia, termasuk tokoh-tokoh NU, lebih mengutamakan persatuan dan keutuhan bangsa daripada menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Mereka lebih memilih penerapan nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat substansial dan universal, yang juga dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.(Mubin, 2020)

NU, melalui para tokohnya, memberikan kontribusi besar dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Salah satu peran penting dimainkan oleh KH. A. Wahid Hasyim, tokoh NU yang menjadi anggota Panitia Sembilan, tim yang bertugas merumuskan usulan konsep dasar negara dari anggota BPUPKI.Sebagai representasi NU, KH. Wahid Hasyim menerima sepenuhnya penghapusan "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta yang kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun seorang yang sangat mencintai agamanya, ia juga seorang nasionalis sejati yang mencintai tanah airnya. Bagi KH. Wahid Hasyim, agama dan tanah air bukanlah hal yang bertentangan.

Sebagai sosok nasionalis religius, pemikiran KH. Wahid Hasyim bersifat progresif dalam berbagai bidang, termasuk agama, politik, sosial, dan pendidikan, sejak awal masa kemerdekaan Indonesia. Meski berasal dari kalangan santri, pandangannya tentang kebangsaan mencerminkan inklusivitas, moderasi, dan nilai-nilai universal. Sifat-sifat inilah yang membuatnya diterima oleh berbagai golongan, baik dari kelompok Islam

E. Peran NU dalam Berbangsa dan Bernegara

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran strategis dalam

menjaga keutuhan bangsa dan membangun kehidupan bernegara di Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar, NU secara konsisten mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman ideologi yang melanggar. Melalui konsep Islam rahmatan lil 'alamin, NU mengedepankan pendekatan moderasi beragama, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. Sikap ini diwujudkan dalam berbagai upaya NU untuk menyelesaikan konflik sosial, menjaga keharmonisan masyarakat multikultural, dan mendorong dialog antaragama sebagai sarana memperkuat persatuan bangsa.

a. Peran NU dalam Pendidikan dan Pembentukan Karakter Kebangsaan

   Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting dalam membangun generasi yang berkarakter kebangsaan melalui pendidikan. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU mengelola ribuan pondok pesantren yang menjadi pusat pembentukan nilai-nilai keislaman yang moderat dan inklusif. Pendidikan di lingkungan NU tidak hanya menekankan pengajaran agama, tetapi juga nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan. Melalui pendidikan berbasis pesantren, NU menanamkan nilai-nilai toleransi, kemanusiaan, dan cinta tanah air kepada santri, sehingga mereka tidak hanya menjadi pemuka agama yang mumpuni, tetapi juga warga negara yang aktif dalam membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa.

b. Peran NU dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Politik

   NU turut serta menjaga stabilitas sosial dan politik Indonesia melalui pendekatan yang moderat dan bijaksana. Sebagai organisasi yang mengedepankan Islam rahmatan lil'alamin, NU konsisten menyuarakan perdamaian, toleransi, dan keadilan sosial. NU juga aktif menjembatani dialog antarumat beragama serta antara masyarakat dan pemerintah untuk mencegah konflik sosial. Dalam dinamika politik, NU mengambil peran

sebagai penjaga keseimbangan, mengingatkan pentingnya etika dalam berpolitik dan mendorong para pemimpin untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Hal ini menjadikan NU sebagai aktor penting dalam menciptakan kehidupan bernegara yang harmonis.

c. Peran NU dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Selain di bidang pendidikan dan politik, NU memiliki peran signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. NU menginisiasi berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, koperasi pesantren, dan pengembangan ekonomi berbasis syariah. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. NU juga berkontribusi dalam upaya penanggulangan bencana dan kemiskinan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Dengan kontribusinya dalam sektor sosial dan ekonomi, NU telah membuktikan diri sebagai organisasi yang tidak hanya peduli terhadap urusan keagamaan, tetapi juga pembangunan bangsa secara menyeluruh.

d. Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

NU konsisten mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan menjaga NKRI dari ancaman ideologi yang bertentangan, seperti radikalisme dan Radikalisme.

e. Membina Kehidupan Keagamaan,

NU berperan dalam membimbing umat Islam melalui pendidikan agama, dakwah, dan fatwa yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, Selain itu Pesantren-pesantren NU berfungsi sebagai pusat pendidikan agama sekaligus tempat pembentukan karakter generasi muda yang cinta damai dan toleran.

BAB III
PENERAPAN NILAI-NILAI RAHMATAN LIL ALAMIN

A. Islam Rahaman Lil Alamin

Islam adalah agama yang mengedepankan nilai-nilai universal, kemanusiaan, fleksibilitas, relevansi dengan konteks zaman, dan keberlanjutan sepanjang masa. Selain itu, Islam merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT untuk menjadi petunjuk hidup umat manusia, yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dan penutup nabi-nabi sebelumnya melalui malaikat Jibril, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Ahzâb (Rasyid, 2016)

Pada prinsipnya, Islam merupakan agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang, menjunjung tinggi sifat tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter (kesamaan derajat), tenggang rasa, kebersamaan, demokratis, keadilan, toleransi, dan seimbang antara urusan dunia dan akhirat..Akan tetapi, Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* hadir bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, dan lainnya.

Semua ciptaan memperoleh rahmat dari Sang Pencipta, dan ajaran Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia di dunia tanpa memandang perbedaan. Dalam Islam, manusia memiliki posisi tertinggi di bumi, yang menjadikannya khalifah dengan tugas menjaga, melindungi, dan melestarikan alam semesta tanpa merusaknya, demi mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat(Ulva et al., 2021)Salah satu kelebihan Islam dibandingkan dengan agama-agama lain di dunia adalah sifatnya yang *Rahmatan Lil 'Alamin*. Islam merupakan agama yang universal dan menyeluruh, sebagai ajaran dan syariat yang ditujukan untuk semua manusia, makhluk hidup, dan alam semesta, serta mencakup seluruh bangsa Jin dan manusia.(Arif, 2021)

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, bersifat fleksibel, dan relevan dengan setiap zaman. Dengan tujuan sebagai petunjuk hidup, Islam diturunkan melalui Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Islam memiliki karakter yang abadi dan berfungsi sebagai pedoman moral serta hukum yang tidak hanya mengatur kehidupan manusia, tetapi juga memberikan prinsip yang berkesinambungan dalam menjaga kedamaian dan keseimbangan dunia. Ajarannya mengajarkan kasih sayang, perdamaian, serta menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan keadilan. Islam mendorong umatnya untuk menjunjung sikap tolong-menolong, tenggang rasa, demokrasi, dan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam hadir untuk menciptakan

kedamaian di seluruh alam, tanpa memandang perbedaan di antara manusia.

B. Hakikat dan Esensi Rahmatan Lilalamin Untuk Seluruh Alam

Rahmatan lil 'alamin adalah istilah dalam Al-Qur'an yang merujuk pada tujuan utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan Islam sebagai agama yang penuh kedamaian, kasih sayang, toleransi, dan cinta kebaikan. Namun, dalam Al-Qur'an, hadis, serta catatan sejarah dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat, tercermin bahwa tidak semua aktivitas dakwah semata-mata ditujukan untuk menegakkan prinsip *rahmatan lil 'alamin.(Hefni, 2017) Hal ini* Sesuai dengan lafaz *"lil 'alamin"*, konsep rahmat ini seharusnya bersifat universal dan mencakup seluruh penjuru dunia. Kasih sayang yang dibawa oleh Islam adalah sesuatu yang harus dirasakan oleh setiap makhluk. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman, yang menyebutkan: *"Sesungguhnya aku diutuskan adalah rahmat bagi seluruh alam."*(Ahmad Sanusi & Mohd Yusof, 2018)

Konsep Islam Rahmatan lil 'Alamin berasal dari firman Allah Swt dalam QS. Al-Anbiya' [21]: 107) yang menjelaskan tujuan diutusnya Nabi Muhammad Saw untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 107)

Ibnu Katsir ketika menafsirlkan rahmatan lil

alamin dalam QS. Al-Anbiya: 107 berkata: "Muhammad saw adalah rahmat bagi semua manusia, siapa saja yang menerimanya, berarti mereka menesyukuri nikmat besar ini, yaitu kasih sayang dan mereka akan bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya siapa yang menolaknya maka mereka akan sengsara di dunia dan akhirat. Oleh karena itu Nabi saw bersabda: 'Aku tidaklah diutus sebagai tukan laknat, tapi akau diutus untuk menjadi rahmat" (HR. Muslim). Dalam riwayat lain Nabi bersabda: "Sesungguhnya aku adalah rahmat yang memberi hidayah pada manusia" (HR. At-Thabrani, Ad-Darimi dan Al- Hakim. Dishahihkan oleh At-thabrani dan Al-Hakim)(Arif, 2021)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw, bukan hanya membawa rahmat, tapi sosok beliau menjadi rahmat. *Hal ini* Sesuai dengan lafaz *"lil 'alamin"*, konsep rahmat ini seharusnya bersifat universal dan mencakup seluruh penjuru dunia. Kasih sayang yang dibawa oleh Islam adalah sesuatu yang harus dirasakan oleh setiap makhluk. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman, yang menyebutkan: *"Sesungguhnya aku diutuskan adalah rahmat bagi seluruh alam."*(Ahmad Sanusi & Mohd Yusof, 2018)

Kata 'Alamin berarti makhluk Allah yang hidup, manusia, malaikat, Jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan semua memperoleh rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad Saw, membawa ajaran Islam.(Zainal Arifin, 2020) Selian itu ayat tersebut dengan menyatakan bahwa Rasulullah adalah rahmat. Bukan hanya kedatangan beliau yang membawa ajaran, tetapi juga kepribadian dan sosok beliau merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Swt. Ayat ini tidak menyebutkan

bahwa Allah tidak mengurus Rasulullah untuk menyampaikan berbagai rahmat, melainkan menjadikan beliau sebagai rahmat itu sendiri, agar beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Secara harfiyah kata rahmah sudah dengan jelas menggambarkan watak anti-kekerasan dan sebaliknya mendorong kebaikan-kebaikan menyeluruh kepada sesama manusia dan kepada seluruh alam sebagai terintegrasi dalam gabungan rahmatan lil-'ālamin. Rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil-'ālamin memiliki implikasi sosial, budaya, dan politik yang penting. Tujuan dari kata ini adalah terciptanya harmoni antara Allah, alam, dan manusia.(Udin, 2020)

Merujuk pada konteks kata "rahmah" dan "Lil 'Alamin" dalam al-Qur'an, terdapat hubungan yang saling terkait yang membawa kepada kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan, yang tidak dapat dipisahkan. Ini merupakan pandangan umum para ahli tafsir dalam menjelaskan makna ayat tersebut. Mereka sepakat bahwa Rasulullah SAW adalah pembawa rahmah bagi kehidupan. Oleh karena itu, Allah adalah pemberi dan pencipta rahmah, Rasulullah sebagai simbol rahmah yang diutus, sedangkan al-Qur'an menjadi pedoman rahmah dalam kehidupan manusia, dengan Islam sebagai jalan rahmah yang mencakup semua aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.(Mohd Nazmi et al., 2020)

Melalui *pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin*, pesan perdamaian Islam dapat lebih efektif disampaikan kepada dunia, mengurangi stereotip negatif terhadap Islam dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang agama ini. Gagasan ini juga mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan alam, yang penting di era

perubahan iklim. Selain itu, dengan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan bermoral, pendidikan yang didasarkan pada *Islam Rahmatan Lil Alamin* juga dapat berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan (Khosiin et al., 2023)

Al-Asfahani menegaskan bahwa dalam konsep rahmat, terdapat dua dimensi, yaitu belas kasih murni (al-Riqqat al-Mujarradah) dan kebaikan tanpa belas kasih (al-Ihsan al-Mujarrad dûna al-Riqqat). Artinya, jika rahmat dikaitkan dengan Allah Swt, maka yang dimaksud adalah "kebaikan murni", sedangkan jika dikaitkan dengan manusia, maka yang dimaksud adalah "simpati murni". Hingga kini, dalam percakapan sehari-hari, orang-orang Arab mengartikan rahmat yang disandarkan kepada Allah sebagai belas kasih, kebaikan, rezeki, dan sebagainya. Sementara itu, rahmat yang disandarkan kepada manusia lebih dipahami sebagai "belas kasih(Rasyid, 2016)

Shihab menjelaskan bahwa redaksi ayat al-Qur'an di atas (QS. al-Anbiyâ [21]: 107) sangat singkat, tetapi mengandung makna yang sangat luas. Hanya dengan lima kata yang terdiri dari dua puluh lima huruf – termasuk huruf penghubung yang terletak pada awalnya–ayat ini menyebutkan empat hal pokok, antara lain 1) rasul/utusan Allahdalam hal ini Nabi Muhamad saw; 2) yang mengutus beliau dalam hal ini Allah; 3) yang diutus kepada mereka (al-'âlamîn) dan 4) risâlah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar sebagaimana dipahami dari bentuk nakirah/indifinitifdari kata tersebut.

Ditambah lagi dengan menggambarkan ketercakupan sasaran dalam semua waktu dan

tempat.Rahmatan lil alaminmerupakan misi kenabian. Misi kenabian ada dua. Pertama, menjadikan umat salaih secara individu, yakni mengajak umat bertakwa kepada Allah Swt. Keduaadalah kesalihan sosial, yaitu membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin(rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk kesalihan sosial adalah menjaga harmonisasi kerukunan antarumat beragama yang merupakan pilar kehidupan sosial yang sangat didambahkan setiap pemeluk agama. Untuk itu, kehadiran Islam rahmatan lil alaminsecara konseptual sebagai bentuk transformasi sosial Islam salah satunya berfungsi membentuk karakter sosial Islam yang toleran dan humanis. Oleh karena itu, yang menjadi problem besar adalah bagaimana mentransformasikan Islam melalui dakwah yang berbasis rahmatanlil alamin(Karyanto, 2017)

C. Prinsip-Prinsip Rahmatan Lilalamin Untuk Seluruh Alam

Rahmatan lil 'alamin adalah prinsip yang berasal dari ajaran Islam, yang secara harfiah berarti "rahmat bagi seluruh alam." Prinsip ini menggambarkan konsep Islam sebagai agama yang membawa kebaikan, kasih sayang, dan manfaat tidak hanya untuk umat manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk dan lingkungan

Prinsip ini mengacu pada nilai-nilai dasar yang mengatur bagaimana Islam seharusnya dipraktikkan sebagai agama yang membawa manfaat, kedamaian, dan harmoni untuk seluruh ciptaan. Rahmat (kasih sayang) yang dimaksud bukan hanya dalam pengertian kasih antarmanusia, tetapi mencakup hubungan

manusia dengan lingkungan, kehidupan sosial, dan seluruh makhluk di bumi. Islam Rahmatan lilalamin menjunjung tinggi cita-cita Islam yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui cinta dan kedamaian. Rahmatan Lilalamin adalahs alah satu dari beberapa pemikiran Islam yang telah dipelajari secara mendalam oleh Para Ulama, antara lain:

a. Humanis yang Peduli sosial (al-Insaniyah)

Islam cocok dan selalu memperhatikan semua kebutuhan dan sifat manusia, itulah yang dimaksud dengan kemanusiaan atau insaniyah. Syariat Islam menuntut agar segala pemaksaan ibadah, aturan, ketentuan, dan larangan harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan manusia. Karena syariat Islam tidak diproduksi oleh Allah dengan sia-sia, kosong, atau tanpa nilai atau tujuan, tidak ada doktrin Islam yang bertentangan dengan umat manusia, dan tidak ada syariat yang tidak membantu manusia.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Namun, ketika ia mengabaikan nilai-nilai kemanusiaannya, derajatnya bisa jatuh lebih rendah dari binatang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat At-Tin ayat 4-5: *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)."*

Hakikat manusia dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dalam dimensi religius, manusia dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sementara itu, dalam dimensi sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam komunitas atau masyarakat.(Warsita, 2017)

Berprikamunisaan secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk mendukung kelangsungan dan

keberadaan hidup manusia agar terhindar dari kehancuran atau kebinasaan. Dalam perspektif pendidikan Islam, humanisme merujuk pada pendidikan yang memanusiakan manusia sesuai dengan perannya sebagai khalifah di bumi. Pendidikan ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, sekaligus mencakup pengkajian ilmu pengetahuan secara komprehensif, baik dalam bidang agama maupun umum.(Ivan Fauzi, 2019)

Ajaran Islam tentang insaniyah juga mengandung makna bahwa semua tujuan, pahala, dan ilmu syariah didasarkan pada pencapaian kesalehan, kasih sayang, dan kemaslahatan bagi semua orang serta melindungi mereka dari penindasan, kejahatan, dan perusakan lingkungan baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Prinsip syariah tidak bertentangan dengan kesejahteraan manusia dan lingkungan.(Sintang, S., & Marinsah, 2020)

Dari penjelasan diatas dapat penulis paparkan bahwa al-Insaniyah dalam prinsip rahmatan lil alamin berarti memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan penghormatan, kepedulian, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Konsep ini melibatkan pengakuan akan nilai, martabat, dan hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam ajaran Islam, al-Insaniyah mencakup sifat-sifat seperti keadilan, kasih sayang, toleransi, dan saling tolong-menolong, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian di antara manusia.

b. Berorientasi global (al-alamiyah)

Prinsip **Rahmatan lil 'Alamin** (rahmat bagi seluruh alam) merupakan konsep universal dalam Islam yang menekankan kasih sayang, kedamaian, keadilan, dan manfaat bagi seluruh umat manusia serta alam semesta. Ketika diterapkan dalam konteks global, prinsip ini menjadi pedoman bagi umat Islam untuk

berkontribusi dalam menciptakan dunia yang harmonis, damai, dan berkelanjutan

Prinsip Rahmatan lil 'Alamin yang mendunia adalah cerminan nilai-nilai Islam yang relevan dengan tantangan dunia modern. Ini menjadikan Islam sebagai agama yang memberikan solusi universal untuk menciptakan dunia yang damai, adil, dan sejahtera bagi semua makhluk. Mendunia atau global (*al-alamiyah*) mengacu pada sifat universal syariah Islam yang tidak terbatas oleh batas geografis, suku, ras, bangsa, iklim, atau kondisi geopolitik tertentu. Syariah Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia dan alam semesta, memberikan manfaat bagi siapa saja yang ingin meraihnya. Globalisasi (alamiyah) dalam syariah Islam mengajarkan prinsip persaudaraan dunia yang melintasi batas-batas golongan, suku, bangsa, dan bahasa. Selain itu, syariah Islam mendorong kerja sama dan saling membantu secara global, termasuk menjaga lingkungan. Sebaliknya, syariah Islam melarang segala bentuk permusuhan antar manusia di mana pun mereka berada di dunia (Budiyanti et al., 2020)

Syariah Islam berlaku untuk seluruh penghuni bumi dan ditujukan kepada siapa saja yang bersedia menerimanya. Islam secara tegas melarang permusuhan antar sesama manusia, di mana pun mereka berada, serta mengutamakan persatuan, kerukunan, dan perdamaian tanpa membedakan suku, ras, agama, warna kulit, budaya, bahasa, maupun bangsa. Allah mendorong manusia untuk saling membantu dalam kebaikan, sehingga mereka dapat saling memberikan manfaat. Prinsip ini dikuatkan oleh firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al-Maidah ayat 2.(Taufikurrahman et al., 2022)

Dapat disumpulkan bahwa rahmatan lil alamin adalah Islam menegaskan sifat universalnya

yang melampaui batas geografis, suku, ras, bangsa, budaya, bahasa, dan kondisi geopolitik. Syariah Islam berlaku bagi seluruh umat manusia dan alam semesta, mengajarkan persaudaraan lintas golongan serta mendorong kerja sama dan kepedulian terhadap lingkungan. Islam melarang permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta mengutamakan persatuan, kerukunan, dan perdamaian.

Prinsip ini mengajak manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan memberikan manfaat satu sama lain, di mana pun mereka berada, tanpa memandang etnis, warna kulit, agama, warna kulit, atau negara, selama bantuan itu untuk kesejahteraan dan keuntungan orang. Rahmat globalisasi Islam adalah kebaikan seluruh alam dan seluruh lingkungan manusia. Syariat Islam telah menjadi universal, artinya dirancang untuk semua orang danseluruh kosmos. Semua bangsa yang telah mengumumkan dan akan terus mewartakan Laa Ilaaha Illallah dianggap Islam (tidak ada Tuhan selain Allah). karena Allah Subhanahu wata'ala, Tuhan semesta alam, adalah sumber dari hukum ini. Akibatnya, Nabi Islam adalah seorang nabi dan pesan untuk semua orang dan kosmos secara keseluruhan.

Prinsip ini menekankan pentingnya menyebarkan nilai-nilai kasih sayang tanpa batasan agama, suku, atau bangsa. Islam sebagai rahmat tidak hanya membawa kebaikan bagi umat Islam, tetapi juga seluruh umat manusia dan makhluk lainnya

c. Komprehensif dan Universal (as-syumul)

Asy-Syumul berarti komprehensif. Hukum Islam itu komprehensif atau mencakup semua aspek kehidupan manusia (Irmayanti et al., 2024) Ajaran Syariah Islam bersifat komprehensif, atau syumul, dan

mencakup setiap aspek keberadaan manusia di dunia dan akhirat. Islam tidak mengenal atau mengakui pembagian atau pembatasan ajarannya pada beberapa dimensi atau sektor kehidupan manusia karena Syariat Islam bersumber dan diterima dari Tuhan Yang Maha Sempurna, Allah SWT. Syariah, atau hukum Islam, mengatur dan mengatur keberadaan manusia di dunia dan akhirat. Akhirat, terkadang disebut sebagai komponen ibadah, adalah bagian tertinggi dan terbesar dari ajaran syariah. Faktor kedua adalah muamalah, yang mengatur interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Syariat Islam yang menyeluruh baik vertikal maupun horizontal memiliki ciri ini.(Aulia Khoirunni aa' Qosiimah et al., 2024)

Hukum Islam dikatakan syumuliyah, yang menunjukkan bahwa itu dimaksudkan untuk diterapkan pada semua jenis kelamin dan tahap kehidupan, termasuk pria dan wanita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua, baik dalam keadaan sulit maupun mudah. Syariat Islam memberikan seluruh hukum dan konsepsi kehidupan secara adil, proporsional, seimbang, dan paripurna untuk semua jeniskelamin, usia, dan tahapan kehidupan manusia, meskipun sebenarnya banyak pendekatan syariat pada berbagai tahapan dan situasi dalam kehidupan manusia (Rahmatika dan Khoirullina, 2020).

Menurut hukum Islam, syumuliyah adalah mengatur segala segi hubungan seseorang dengan Allah SWT (ibadah) serta menata, mengarahkan, dan membina segala segi keberadaan seseorang dengan orang lain dan lingkungannya (muamalah) secara
utuh, seimbang. , dan cara yang harmonis. Ibadah tidak mendistorsi dan menindas muamalah, begitu pula sebaliknya, agar bidang muamalah tidak menjadi penghalang atau mengecilkan bidang muamalah. Hukum Islam berlaku dan relevan di semua tempat,

setiap saat, dan di semua iklim karena syumuliyah, atau universal. Hukum Islam, termasuk ibadah dan muamalah, berlaku setiap saat dan di semua tempattanpa kecuali. Tidak ada bangsa atau negara yang hukum Islamnya lebih berkembang daripada yang lain. Tidak ada satu pun suku, ras, atau negara yang dapat mengklaim dirinya lebih Islami, lebih unggul, atau lebih baik dari negara dan suku lain didunia

d. Toleransi dan Memudahkan (as-samhah dan at-taisir)

Sebuah prinsip yang menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan masing-masing individu. Prinsip ini menekankan pentingnya hidup rukun dan damai tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, pandangan, atau asal negara. Namun, prinsip ini menegaskan bahwa toleransi hanya dapat diterima jika tidak merugikan agama Islam. (Rahmatika & Khoirullina, 2020)

Konsep toleransi adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Namun, toleransi bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada seseorang untuk bertindak sesuka hati. Untuk mewujudkan konsep ini, diperlukan aturan dan batasan yang jelas. Dalam Islam, toleransi didasarkan pada beberapa prinsip, salah satunya adalah *Al-hurriyyah al-dîniyyah*, *Insaniyah, dan wasathiyah* yang berarti kebebasan beragama dan berkeyakinan.(Rosyidi, 2019)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama Islam, karena tindakan semacam itu tidak dibenarkan. Sebagai agama yang menjunjung perdamaian, Islam menekankan bahwa kedamaian sejati hanya dapat diraih ketika jiwa mampu menemukan ketenangan secara alami. Pemaksaan tidak akan menghasilkan kedamaian dalam hati seseorang yang tidak menginginkannya. Oleh

karena itu, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan istilah *tasamuh*, yang bukanlah konsep baru. Sejak masa Nabi Muhammad Saw, perbedaan telah menjadi bagian dari masyarakat di Mekkah dan Madinah, namun Nabi senantiasa menunjukkan sikap toleransi terhadap mereka yang berbeda keyakinan.(Zulham & Lubis, 2022)

Ajaran Islam dengan demikian tegas melarang memiliki pandangan ekstrimis, keras, atau tidak toleran terhadap orang lain. Syariat Islam selalu mengutamakan kesederhanaan dan solusi langsung daripada yang kompleks, rumit, dan bermasalah. Inilah motif sentral Islam Wasathiyah sekaligus motif sentral syariah Islam. Mirip dengan ini, ciri utama Islam adalah toleransi. Nabi dan para sahabat bersikap toleran

D. Nilai-Nilai Islam yang Berhubungan dengan Rahmatan Lilalamin Untuk Seluruh Alam

Karakterisk merupakan sifat-sifat atau ciri-ciri khas yang melekat pada konsep *rahmatan lil alamin*, yang menggambarkan bagaimana Islam sebagai agama dapat membawa rahmat, kebaikan, dan kasih sayang kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali.Konsep ini menekankan nilai-nilai universal Islam yang tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi manusia secara umum, lingkungan, serta makhluk hidup lainnya. Karakteristik ini menjadi landasan perilaku umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun dalam masyarakat.

a. Kasih Sayang dan Kepedulian Mahluk

Kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya,

terutama manusia, bersifat universal. Allah tidak membeda-bedakan manusia di muka bumi ini dan memperlakukan semuanya dengan adil. Namun, rahmat-Nya diberikan sesuai dengan kehendak dan kekuasaan-Nya. Kasih sayang Allah merata, mencakup muslim, non-muslim, pendosa, dan pelaku maksiat. Meski banyak dari makhluk-Nya yang tidak mensyukuri rahmat tersebut, Allah tetap melimpahkan rahmat-Nya. Sayangnya, meskipun rahmat Allah begitu melimpah, masih banyak manusia yang tetap ingkar, melanggar larangan-Nya, dan enggan menjalankan perintah-Nya.(Ummah, 2019)

Rahmatan lil alamin menekankan kasih sayang kepada seluruh makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Umat Islam diajarkan untuk berperilaku lembut, membantu sesama, dan menjaga keberlanjutan, Karena hati cenderung mengalami perubahan atau fluktuasi, diperlukan perawatan yang rutin dan baik untuk mempertahankan kualitas perasaan tersebut.(Prathama & Mahadwistha, 2024)

Selain itu, konsep *rahmatan lil alamin* mengajarkan umat Islam untuk menebarkan kasih sayang tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Umat Islam didorong untuk bersikap lembut, peduli, dan menjaga keberlanjutan alam sebagai wujud nyata kasih sayang. Mengingat hati manusia rentan terhadap perubahan, diperlukan upaya yang konsisten untuk menjaga kualitas kasih sayang tersebut, baik melalui perbaikan diri maupun perbuatan baik terhadap sesama makhluk.

Kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya, khususnya kepada manusia di dunia adalah sama. Allah menyamakan setiap manusia di permukaan bumi ini tanpa pilih kasih, tetapi Dia memberikan rahmatNya sesuai dengan qadrat dan iradat-Nya. Kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya di dunia adalah sama, terhadap muslim, kafir, fasik, atau durjana. Rahmat-Nya terus melimpah kepada makhluk-Nya meskipun mereka tidak mensyukurinya.Meskipun rahmat Allah melimpah ruah kepada makhluk-Nya, masih banyak di antara mereka yang ingkar dan tidak menjauhi larangan-Nya, dan tidak patuh melaksanakan perintah-Nya

b. Anti kekerasan

Anti-kekerasan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam. Perintah untuk saling mengasihi tidak hanya ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian mulia, penuh kasih sayang, dan mencintai perdamaian. Pada hakikatnya, semua manusia mendambakan kehidupan yang dipenuhi rasa aman, damai, dan kasih sayang antar sesama. Ketika keamanan, perdamaian, dan kasih sayang terwujud, manusia dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Mutaqin, 2023)

Kekerasan perlu diberantas dengan upaya besar dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, sangat penting. Anak-anak harus dibimbing

menjadi individu yang memiliki karakter baik, tulus, beriman, dan bertakwa, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai penerus bangsa. Dengan nilai-nilai ini, mereka akan mampu bekerja sama dengan orang lain tanpa mengandalkan kekerasan sebagai Solusi (Simatupang & Abduh, 2020)

Konsep *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta alam) dalam Islam menekankan pentingnya kasih sayang, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh makhluk tanpa diskriminasi. Sebagai bagian dari prinsip ini, Islam mengajarkan anti-kekerasan, baik dalam hubungan antarindividu, masyarakat, maupun terhadap alam. Ajaran ini mencakup larangan untuk menyakiti, merusak, atau menindas makhluk lain, baik secara fisik, verbal, maupun emosional.

Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam menerapkan *rahmatan lil alamin* sebagai bentuk anti-kekerasan. Beliau senantiasa mengutamakan dialog, toleransi, dan kasih sayang, bahkan terhadap mereka yang memusuhinya. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diajarkan untuk menghindari permusuhan, menyelesaikan konflik dengan damai, dan menjalin hubungan harmonis dengan semua pihak. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, *rahmatan lil alamin* menjadi solusi untuk menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian, harmoni, dan keberlanjutan bagi semua makhluk.

c. Guyub rukun dan Saling Toleransi

Bangsa Indonesia sangat memerlukan konsep yang jelas mengenai kerukunan hidup antar umat beragama, terutama di tengah masyarakat yang pluralistik. Kerukunan antar umat beragama sangat

vital untuk mencegah terjadinya konflik antara pemeluk agama yang berbeda, yang bisa menyebabkan disintegrasi nasional. Oleh karena itu, masalah kerukunan antar umat beragama harus mendapatkan perhatian khusus. Diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman yang benar serta metode yang efektif guna menciptakan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang beragama. Dalam pandangan Islam, kerukunan antar umat beragama memiliki peran penting yang harus dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa agama Allah adalah universal, karena Allah mengutus rasul-rasul-Nya untuk semua umat manusia.(Bakar & Hurmain, 2016)

Dalam kehidupan beragama, sikap toleransi menjadi syarat utama bagi individu yang ingin menciptakan kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Dengan adanya toleransi, diharapkan tercipta interaksi yang harmonis serta pemahaman yang baik di antara masyarakat beragama. Hal ini mencakup kesadaran akan batasan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan sosial yang beragam, baik dari segi suku, ras, agama, maupun keyakinan.(Simatupang & Abduh, 2020)

Rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam) mengajarkan pentingnya kerukunan dan saling toleransi antar umat manusia. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama meskipun terdapat perbedaan dalam agama, suku, ras, atau budaya. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman dan nyaman, serta dihormati martabatnya sebagai

ciptaan Allah.

Dalam konteks kerukunan, *rahmatan lil alamin* menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis di antara umat beragama. Hal ini berarti menghindari konflik dan kekerasan, serta lebih fokus pada dialog, saling memahami, dan menghargai perbedaan. Toleransi menjadi kunci untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat yang plural. Dengan prinsip ini, umat Islam diharapkan bisa menjadi agen perdamaian yang menyebarkan kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk, serta berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih damai dan adil.

d. Keadilan

Rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam) juga mengarah pada terciptanya keadilan bagi seluruh makhluk. Prinsip ini mengajarkan bahwa Islam tidak hanya mengutamakan kasih sayang, tetapi juga menekankan perlunya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan dalam pandangan Islam mencakup keadilan sosial, ekonomi, hukum, dan perlakuan terhadap sesama makhluk.

Keadilan adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam dalam Miriam Boedihardjo (1982) menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam tujuan negara, bersama dengan keamanan eksternal, ketertiban internal, kesejahteraan umum, dan kebebasan. Tugas pemerintah adalah untuk menciptakan keadilan. Bagi Indonesia, tujuan bernegara adalah memastikan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.(Ivan Fauzi, 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, Indonesia sebagai negara-bangsa dibentuk dengan latar belakang kemanusiaan dan keadilan, serta memiliki tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut mencakup perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan kontribusi terhadap terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia memilih dasar yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan, yang dikenal dengan Pancasila. Oleh karena itu, kemanusiaan dan keadilan menjadi inti dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang tercermin dalam setiap tahap pembentukan negara, mulai dari latar belakang, penetapan tujuan, hingga pemilihan dasar dalam berbangsa dan bernegara (Sumadi, 2016)

E. Penerapan Rahmatan Lilalamin dalam Kehidupan

Rahmatan lilalamin, yang berarti "rahmat bagi seluruh alam," merupakan prinsip Islam yang mendorong umat manusia untuk memberikan manfaat kepada semua makhluk, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, kasih sayang, dan saling menghormati. Misalnya, ketika menghadapi perbedaan pendapat, seseorang dapat memilih untuk berdialog dengan bijak dan mencari jalan tengah, alih-alih bersikap konfrontatif. Selain itu, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bentuk penerapan rahmatan lilalamin, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, dan merawat flora serta fauna di sekitar kita.

Selain itu, rahmatan lilalamin juga dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu, atau menjadi relawan dalam kegiatan sosial adalah beberapa contoh konkret. Dengan memperhatikan kebutuhan sesama, kita tidak hanya menjalankan ajaran agama, tetapi juga membangun harmoni dalam masyarakat. Dengan begitu, konsep rahmatan lilalamin menjadi cara hidup yang mampu menciptakan kedamaian dan keberkahan bagi seluruh makhluk di bumi.(Jamaluddin, n.d.)

Konsep rahmatan lilalamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan menciptakan kebijakan dan sistem yang adil serta inklusif bagi seluruh rakyat tanpa membedakan agama, suku, atau golongan. Pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Misalnya, nilai-nilai rahmatan lilalamin dapat diterapkan melalui penguatan toleransi antarumat beragama, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Dengan menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan, sebuah negara mampu menjadi rahmat tidak hanya bagi warganya, tetapi juga untuk semua.

BAB IV
PANCASILA SEBAGAI PEDOMAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Indonesia telah mencapai 75 tahun kemerdekaannya, melewati perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh suka dan duka. Banyak pencapaian telah diraih, meskipun tantangan dan kekurangan masih tetap ada. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*archipelagic state*), menyatukan wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau bukanlah hal yang mudah. Tantangan semakin besar dengan adanya keragaman suku, ras, etnis, agama, kepercayaan, serta kekuasaan raja-raja kecil dan besar yang telah ada sejak berabad-abad lalu.

Sejak kemerdekaan, berbagai kelompok atau gerakan yang bertujuan menggantikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dengan ideologi lain terus bermunculan. Peristiwa seperti pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII), gerakan PERMESTA, pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948, serta

Gerakan 30 September PKI pada tahun 1965 menjadi bagian dari sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa Indonesia.Namun, bangsa Indonesia patut bersyukur karena meskipun perjalanan tersebut dipenuhi tantangan dan hambatan, termasuk konflik dan ancaman disintegrasi, Indonesia tetap berdiri teguh hingga saat ini.

Indonesia telah memasuki ke 75 tahun kemerdekaan. Era kehidupan berbangsa dan bernegara telah dilalui dengan penuh suka dan duka. Banyak kemajuan yang telah dicapai, namun tetap masih ada masalah dan kekurangan yang dihadapi. Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang terbesar di dunia. Tidak mudah menyatukan territorial Indonesia yang berkepulauan. Belum lagi kepelbagaian suku, ras, etnis, agama dan aliran kepercayaan serta kekuasaan raja-raja kecil maupun besar yang telah ada di tanah air berpuluh abad sebelumnya. Sejak awal kemerdekaan, kelompok atau gerakan yang bercita-cita untuk mengganti dasar dan falsafah negara Pancasila ke ideologi lain selalu muncul saling silih berganti. Selain Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII), PERMESTA, juga pemberontakan komunis di Madiun tahun 1948 dan Gerakan PKI 30 September 1965 adalah peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa dalam perjalanan yang tidak mudah, penuh kerikil tajam tersebut Indonesia masih tegak berdiri sampai sekarang ini.(Sabri, Mohammad, 2020)

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman, terdiri dari berbagai pulau, suku, bahasa daerah, agama, ras, dan budaya atau adat istiadat. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Kekayaan tersebut diwariskan kepada generasi penerus bangsa untuk dijaga, dilestarikan, dan dirawat dengan baik.Meskipun memiliki berbagai perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu dengan Pancasila sebagai dasar negara. Perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan

melahirkan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.

Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno sebagai *philosofische grondslag* (landasan filosofis atau jiwa) bagi Indonesia merdeka. Menurut Soekarno, perjuangan menuju kemerdekaan harus berlandaskan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari jiwa dan sanubari rakyat Indonesia. Dalam pemikirannya sejak 1918, Soekarno merumuskan dasar-dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme (kemanusiaan), mufakat/permusyawaratan, kesejahteraan (keadilan sosial), dan ketuhanan. Kelima prinsip ini kemudian disebut Pancasila dan diusulkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka.(D. A. Nurhayati & Ambari., 2020)

Pancasila adalah nama dari norma dasar yang menjadi fondasi Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Rumusan Pancasila dibuat oleh para pendiri bangsa dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai dasar kesatuan bangsa, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, dan panduan perilaku bangsa Indonesia. Pancasila juga merepresentasikan jiwa bangsa Indonesia, yang telah berhasil menyatukan keanekaragaman di dalamnya. Tanpa norma dasar ini, Indonesia tidak akan menjadi seperti sekarang maupun di masa mendatang. Oleh karena itu, Pancasila adalah elemen penting yang menjamin persatuan dan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia.(Unggul et al., 2020)

B. Makna dan Esensi Pancasila

Secara etimologis, istilah "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata: *Panca* yang berarti lima, dan *Sila* yang berarti dasar. Dengan demikian,

Pancasila bermakna "lima dasar," yaitu lima dasar negara Republik Indonesia.Kata "sila" juga dapat diartikan sebagai aturan yang menjadi landasan perilaku individu atau bangsa, mencakup tata krama, akhlak, dan moral.

Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, SH, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, sebagaimana tercantum dalam *Negarakertagama* karya Empu Prapanca dan *Sutasoma* karya Empu Tantular. Dalam *Sutasoma*, Pancasila berarti "lima sendi batu" dan juga "lima pedoman kesusilaan" (Pancasila Krama), yang meliputi: (1) Tidak melakukan kekerasan (*ahimsa*).(2) Tidak mencuri (*asteya*).(3) Tidak berjiwa dengki (*Indriya nigraha*).(4) Tidak berbohong (*amrswada*) (5)Tidak mabuk minuman keras (*dama*).(Kaderi, 2015)

Menurut Soekarno menjelaskan dasar-dasar yang harus dimiliki Indonesia sebagai negara merdeka. Ia mengidentifikasi lima elemen utama: kebangsaan atau nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau permusyawaratan, keadilan sosial, serta ketuhanan dan kebudayaan. Kelima prinsip tersebut kemudian dinamai Pancasila dan diusulkan sebagai *Weltanschauung* (pandangan hidup) bagi negara Indonesia yang merdeka (Agustinus, W. D., 2015).

Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar filosofis negara Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bagi seluruh rakyat. Pancasila berfungsi sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan, dan alat pertahanan bangsa dan negara. Kelima sila Pancasila mencerminkan ide-ide fundamental tentang manusia dan realitas, yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip ini bersumber dari karakter dan kebudayaan Indonesia yang menjadi landasan berdirinya negara (Kaelan, 1996)

Pancasila adalah ideologi dasar negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila mencakup lima prinsip fundamental,

yaitu: (1)Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.(3) Persatuan Indonesia. (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.Sebagai ideologi negara, Pancasila dijadikan landasan filosofis, moral, dan etis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara

Pancasila adalah sistem nilai yang bersifat organik dan saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, akan menjadi kekuatan moral yang besar apabila diterapkan secara menyeluruh sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(Idrus, 2022)

Dari urian diatas bahwa Makna Pancasila Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna Pancasila mencakup: (1) Dasar Negara: Menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem hukum Indonesia. (2) Pandangan Hidup Bangsa: Memberikan arah dan pedoman dalam sikap, perilaku, dan keputusan masyarakat Indonesia. (3) Kepribadian Bangsa: Merepresentasikan nilai-nilai luhur yang mencerminkan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Sedangkang Esensi Pancasila terletak pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam setiap sila: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa: Mengakui keberadaan Tuhan, menghormati kebebasan beragama, dan mendorong toleransi antarumat beragama.(2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (3) Persatuan Indonesia: Menekankan pentingnya rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan menjaga keutuhan bangsa. (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mengutamakan musyawarah, demokrasi, dan partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan. (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mengupayakan kesejahteraan, pemerataan keadilan, dan penghapusan kesenjangan sosial.

.

C. Pancasila sebagai Landasan Ideologi Bangsa Indonesia

Ideologi Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selain itu pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta landasan nilai untuk mencapai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia**.**

Menurut Munir, dkk. (2014), ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat sistem kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keyakinan tersebut terbentuk melalui proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai unsur, seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran tokoh-tokoh penting. Jika ideologi bersumber dari kebudayaan, maka hal ini mencakup berbagai elemen budaya, seperti sistem religi dan ritual keagamaan, organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, serta kesenian

Pancasila adalah ideologi terbuka yang memiliki sifat orisinal. Kelima sila dalam Pancasila bersifat universal, sehingga nilai-nilainya juga dapat ditemukan dalam pemikiran berbagai masyarakat lain. Di Indonesia, kedudukan Pancasila sangat jelas sebagai dasar negara, pedoman hidup masyarakat dalam berbagai aspek, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai ideologi bangsa. Sebagai pedoman hidup, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terjamin kebenarannya, menjadikannya landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(Rizqullah & Najicha, 2022)

Pancasila, yang telah disepakati sebagai ideologi negara oleh rakyat Indonesia, sering menghadapi berbagai tantangan dan ujian seiring perubahan situasi sosial-politik dan perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung harapan bahwa nilai-nilai dasarnya dapat berkembang dan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pemerintah yang selaras dengan dinamika masyarakat dan bangsa demi tercapainya tujuan negara.(Azikin, 2018) hal ini sejalan dengan Ideologi Pancasila memiliki sifat yang aktual, dinamis, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagai dasar negara, Pancasila pada dasarn(Widiatama et al., 2020)

Pancasila, yang disepakati sebagai ideologi negara oleh rakyat Indonesia, sering menghadapi tantangan dan ujian seiring perubahan situasi sosial-politik dan perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila diharapkan mampu berkembang dan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan dinamika masyarakat dan bangsa untuk mewujudkan tujuan negara. Namun, dalam praktik pemerintahan sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya memiliki tolok ukur yang jelas untuk diterapkan secara operasional. Selain itu, interpretasi nilai-nilainya seringkali berbeda dalam penyusunan kebijakan (Azikin, 2018)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka yang menjadi dasar negara Indonesia dan pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, Pancasila bersifat universal, aktual, dinamis, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sebagai landasan utama, Pancasila diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah yang selaras dengan dinamika masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila

dalam praktik pemerintahan dari era Orde Lama hingga Reformasi sering menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan interpretasi nilai-nilainya diterapkan secara konsisten dan operasional.

D. Pancasila sebagai Dasar Kehidupan Bernegara

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara berasal dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dituangkan dalam memorandum DPR-GR pada 9 Juni 1966. Penegasan posisi Pancasila sebagai dasar negara semakin diperkuat dengan keluarnya Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang diterapkan sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Kirdi Dipoyudo menyatakan bahwa negara Pancasila adalah negara yang dibangun dan dipertahankan dengan tujuan untuk melindungi martabat serta hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan atau dihancurkan dengan mudah. (Sjech et al., 2024)

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila, yang masing-masing mengandung nilai dasar yang penting. Nilai-nilai dasar tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara ringkas, nilai dasar Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila juga dapat dipahami sebagai ideologi negara Indonesia atau sebagai rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara.Penerapan Pancasila sebagai dasar negara berarti

Indonesia adalah negara Pancasila, yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan untuk melindungi serta memajukan martabat dan hak-hak seluruh warga negara. Tujuan utamanya adalah agar setiap rakyat dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri, dan mencapai kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menerapkan prinsip keadilan sosial.(Handayani & Dewi, 2021) Sebagai dasar negara (ground norm) bangsa Indonesia, Pancasila terbukti menjadi salah satu alat pemersatu dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui lima sila yang terkandung dalam Pancasila, fondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kuat, mampu menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila telah menjadi pilar utama dalam pembentukan dan pengaturan kehidupan bernegara. Hal ini terbukti dari pengakuannya yang luas dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 dan memiliki peran besar dalam membangun sistem hukum, pemerintahan, serta nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan di Indonesia. Meskipun Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, masih banyak tantangan dan masalah dalam penerapannya. Salah satu masalah utama adalah sejauh mana pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila memengaruhi kebijakan dan praktik di berbagai sektor, seperti hukum, politik, sosial, dan ekonomi (Senja Tiarylla et al., 2023)

Pancasila tetap relevan di era modern karena mencakup berbagai aspek mendasar dalam kehidupan. Selain itu, Pancasila berperan sebagai landasan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan bersama bagi rakyat Indonesia. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila secara konkret belum sepenuhnya berhasil, karena keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum tercapai sepenuhnya.

Sebagai kepribadian bangsa, nilai-nilai luhur Pancasila mulai memudar akibat pengaruh perilaku yang terlalu berfokus pada aspek ekonomi dan gaya hidup negatif dari globalisasi.

Sebagai dasar negara, penting bagi kita untuk terus memperjuangkan, menjaga, melestarikan, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan langkah ini, tujuan Pancasila dapat terwujud, sekaligus memperkuat ketahanan jati diri bangsa. Selain itu, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis. Ideologi Pancasila bersifat terbuka, dengan dua dimensi utama: nilai ideal dan nilai aktual. Namun, pengaruh budaya globalisasi dapat menggeser pemaknaan nilai-nilai Pancasila, membawa perubahan dalam peradaban. Oleh karena itu, generasi muda harus mampu menyaring budaya asing dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.(Handayani & Dewi, 2021)

E. Pancasila sebagai Peneguh Kebhinekaan

Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya akan keberagaman, terdiri dari berbagai budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, kepercayaan, dan banyak lagi. Meskipun begitu, Indonesia berhasil mempersatukan semua perbedaan tersebut dalam semangat semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sejarah menunjukkan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup berdampingan, saling melengkapi, atau berjalan sejajar. Sebagai contoh, kebudayaan keraton atau kerajaan pernah berkembang berdampingan dengan budaya berburu dan meramu yang dianut oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu.

Dalam konteks saat ini, kita bisa melihat bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan sejajar dengan kebudayaan pedesaan (rural), bahkan dengan kebudayaan berburu dan meramu yang masih ada di daerah terpencil. Interaksi antarbudaya ini terjalin dalam bingkai "Bhinneka Tunggal Ika," yang memberikan makna bahwa keberagaman di Indonesia tidak hanya mencakup suku bangsa, tetapi juga

berbagai bentuk kebudayaan yang ada, (Salim, 2017)

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu," menegaskan pentingnya pluralisme dan multikulturalisme yang disatukan oleh semangat nasionalisme. Nasionalisme ini harus mengedepankan kepentingan nasional tanpa mengesampingkan tanggung jawab terhadap dunia secara global. Oleh karena itu, Pancasila mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki perbedaan, kita tetap bersatu sebagai satu bangsa dan satu negara

hinneka Tunggal Ika memiliki makna yang mendalam, yaitu meskipun Indonesia memiliki keragaman suku, agama, ras, kesenian, adat istiadat, bahasa, dan lainnya, semuanya tetap bersatu sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Semboyan ini mencerminkan pemikiran rasional bangsa Indonesia sebagai negara yang majemuk, dengan keberagaman budaya, agama, ras, dan bahasa. Oleh karena itu, menjaga dan menghormati *Bhinneka Tunggal Ika* adalah tanggung jawab kita bersama, demi mewujudkan persatuan yang bermartabat.

Untuk melindungi martabat *Bhinneka Tunggal Ika*, segala bentuk ancaman, seperti sentimen kedaerahan dan separatisme, harus ditolak. Dalam Pancasila, nilai-nilai *Bhinneka Tunggal Ika* tercermin pada sila ketiga, yaitu "Persatuan Indonesia," yang menjadi dasar hukum integrasi bangsa dan negara, sekaligus motivasi untuk bertindak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila, sebagai inti dari jati diri bangsa, menjadi "jiwa" yang menghidupkan Indonesia.(Santoso et al., 2023)

F. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mencakup konsep dasar mengenai kehidupan yang diidamkan, dasar pemikiran, serta gagasan tentang bentuk kehidupan yang diinginkan. Pandangan hidup adalah hasil kristalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai yang diyakini

kebenarannya, yang kemudian mendorong tekad untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai pandangan hidup sering kali disebut sebagai *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung cita-cita bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea kedua, yang berbunyi, "Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam Pancasila adalah hasil kajian yang sistematis, teratur, dan terukur, yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Gagasan tentang kehidupan yang lebih baik dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang tetap dan tidak dapat diubah. Kehidupan bermasyarakat harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah dalam setiap tindakan atau aktivitas sehari-hari. Dengan kata lain, setiap sikap dan perilaku masyarakat Indonesia harus mencerminkan dan dipandu oleh nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sebagai petunjuk hidup. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari perlu dijaga dengan baik agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.(Rahma & Dewi, 2021)

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung cita-cita bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea kedua, yang berbunyi, "Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam Pancasila adalah hasil kajian yang sistematis, teratur, dan terukur, yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Gagasan tentang kehidupan yang lebih baik dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang tetap dan tidak dapat diubah. Kehidupan bermasyarakat harus selaras dengan

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

G. Nilai Luhur Pancasila Sebagai Solusi Menghadapi permasalahan Bangsa

Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan nilai ideal yang dirumuskan dengan cermat oleh para pendiri bangsa. Dalam proses perumusannya, terjadi perdebatan tentang bagaimana membentuk model terbaik bagi manusia Indonesia di masa depan. Melalui diskusi yang mendalam dan perdebatan intelektual, lahirlah konsep Pancasila yang mulia dan memiliki cita-cita luhur. Oleh karena itu, berbagai penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia seharusnya dapat dikaitkan dengan kurangnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.(D. A. Nurhayati & Ambari., 2020)

Pancasila menegaskan pentingnya menghormati hukum dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain, seperti korupsi,konfik, kekerasan, intoleran. Permasalahan Nasional bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hal ini akan merusak tatanan kehidupan masyarakat, tetapi juga melemahkan persatuan bangsa. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat, serta didukung oleh peran pemerintah dan institusi pendidikan. (Sholikhah et al., 2023) oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara berperan dalam mengatur seluruh aspek permasalahan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ini berarti bahwa setiap hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berpedoman pada Pancasila

Adapun yang menjadi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Krisis Bangsa dan akar masalah bangsa antara lain:

- **Kemiskinan**: Tingginya angka kemiskinan di Indonesia

menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan membuat banyak orang hidup dalam kondisi yang tidak layak, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

a. Korupsi: Korupsi merusak sistem pemerintahan dan ekonomi negara, mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik ke dalam kantong pribadi. Hal ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi bangsa, serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
b. Penegakan Hukum yang Lemah: Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil dan tegas menyebabkan ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakpastian hukum. Ini juga membuka peluang bagi praktik-praktik ilegal untuk berkembang.
c. Kasus Syara yang Merajalela: Merujuk pada masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang berbasis pada ajaran agama atau syariah, yang dapat menambah kompleksitas dalam menangani masalah sosial dan hukum di Indonesia yang multikultural.
d. Kesenjangan Sosial: Kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
e. Kemacetan: Kemacetan lalu lintas yang semakin parah di kota-kota besar menyebabkan pemborosan waktu, biaya, dan energi. Hal ini juga berdampak negatif terhadap produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
f. Banyak Daerah yang Kurang Diperhatikan: Beberapa daerah di Indonesia masih tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan pembangunan ini menyebabkan ketidakmerataan kualitas hidup antar daerah.

g. Pemerataan Pengetahuan dan Wawasan: Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan informasi di berbagai daerah menghambat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri. Tanpa pemerataan pengetahuan dan wawasan, sulit bagi masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa.(Susilawati, 2020)

Pancasila dapat menjadi solusi untuk permasalahan bangsa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan, dapat menjadi landasan untuk mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, korupsi, ketimpangan sosial, serta penegakan hukum yang lemah, sehingga tercipta kehidupan yang lebih harmonis dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN PONDOK PESANTREN

Pesantren telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa. Banyaknya jumlah pesantren di Indonesia, serta besarnya jumlah santri pada tiap pesantren menjadikan lembaga ini layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral.

A. Sistem Pengelolaan Manajemen Pesantren

Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang di-kembangkan secara *indigenous* oleh masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang sadar sepenuhnya akan pentingnya arti sebuah pendidikan bagi orang pribumi yang tumbuh secara natural. Terlepas dari mana tradisi dan sistem tersebut diadopsi, tidak akan mempengaruhi pola yang unik (khas) dan telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. (Ainurrafiq Dawam, 2005) Terkait dengan manajemen pesantren yang merupakan sarana penggunaan seumberdaya yang efektif untuk mencapai sasaran maka perlu adanya stretegi atau siasat seperti ditegas oleh Bapak Mujamail Qomar bahwa manajemen penuh siasat yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan (Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, 2005) Sebagai seni, manajemen lebih menitik beratkan pada peranan manusia sebagai pelaku manajemen dengan menggunakan pendekatan *scientific*, tetapi juga professional. Merupakan Lembaga Pendidikan

Islam yang paling variatif adalah Pesantren, mengingat adanya kebebasan dari kiai pendirinya untuk mewarnai pesantrennya itu penekannya pada kajian tertentu. Misalnya, ada pesantren ilmu " *alat*", pesantren fiqih, Pesantren Al Qur'an, Pesantren hadits, atau pesantren tasawuf. Masing-Masing didasarkan pada keahlian kiainnya. Ditinjau dari kesegiterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari luar, pesantren dapat dibagi dua : P*ertama* Pesantren salafi *dan kedua* pesantren Pesantren khalafi.Pesantern salafi bersifat kenservatif sedangan khalafi bersifat adaptif Adaptasi dilakukukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang merupakan akibat dari tuntutan perkebangan sains dan teknologi.(Mujamil Qomar, 2007)

Perbedaan pesantren tradisional dengan pesantren modern dapat diidenfifikasi dari perpespektif manajerialnnya. Pesantren modern dapat telah dikelola secara rapi dan sistematis dengan mengikuti kaidah-kaidah manajerial yang umum. Sementara itu, pesantren tradisional berjalan secara alami tanpa berupaya mengelola secara efektif. Maka pembahasan manajemen ini lebih diarahkan pada pesantren tradisional karena pesantren ini mengahadapi tantangan multidiensi.[3]

B. Manajer Pesantren dan Kekuasaannya

Di kalangan pesantren kiai merupakan aktor utama. Kiailah yang merintis Pesantren, mengasuh, menentukan mekanisme belajar dan kurikulum serta mewarnai dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya.Tugas sorang kiai memang sangat mutifungsi : sebagai guru, mubaligh, sekaligus manajer. Sebagai guru, kiai menekankan kegiatan pendidikan para santri dan masyarakat sekitar agar memiliki kepribadian muslim yang utama; sebagai mubaligh kiai berupaya menyampaikan ajaran islam kepada siapapun berdasarkan prinsip memerintahan kebaikan dan mencegah kemungkaran

(*Amar ma'ruf nahi mungkar*) dan sebagai manajer kiai memerankan pengendalian dan pengaturan bawahannya. Nuryam Syam menambahkan tiga fungsi kiai : *Pertama* Sebagai agen Budaya. Kiai memainkan peran sebagai penyaring budaya yang merambah masyarakat. *Kedua* Kiai sebagai mediator yaitu menjadi penghubung antara kepentingan berbagai segmen masyarakat. *Ketiga* Sebagai makelar budaya dan mediator. Kiai menjadi penyaring budaya sekaligus penghubung berbagai kepentingan masyarakat. Dalam pesantren kiai merupakan figure sentral, otoritatif, dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan disamping itu juga sebagai pempimin tunggal yang memegang hampir mutlak. Uniknya rangkaian kebiasaan tersebut memunculkan kenyataan bahwa adalah pempimpin yang kharimmatik. Menurut Nurcholis Madjid ada beberapa kerugian kepemimpinan karismatik antara lain Karisma,Personal,Religio-Feodalisme,Kecakapan teknis.

Ada empat kerugian kepemimpinan kharismatik tersebut :

1. Ketidakpastian dalam perkembangan pesantren karena semua hal tergantung kepada keputusan pribadi kiai.
2. Keadaan kurang mendukung tenaga-tenaga pembantu untuk mencoba pengembangan yang belum diterima figur kepemimpinan yang ada.
3. Pola pergantian kepimpinan berlangsung secara tiba-tiba dan tidak direncanakan sehingga lebih banyak ditandai oleh sebab-sebab alami seperti meninggalnya pempin secara mendadak.
4. Terjadianya pembauran dalam tingkat pempimin dipesantren antara lokal regional dan nasional.(Mujamil Qomar, 2007)

C. Starategi Kepemimpinan Pesantren.

Masa Depan pesantren sangat ditentukan oleh faktor manajerial. Pesantren kecil akan berkembang secara signifikan manakala dikelolola secara profesioanal. Dengan pengelolaan yang sama pesantren yang mudah besar akan

bertambah besar. Sebaliknya pesantren yang maju akan mengalami kemunduran manakala manajemennya tidak terurus dengan baik. Jika pesantren mengabaiakan manajemen pesantren kecil akan gulung tikar dalam mengahadapi multideimensi.Pola-Pola kepemimpinan kiai dipesantren yang selama ini kurang kondusif menghadapi tantangan-tantangan moderenisasi bahkan perlu diubah menjadi pola-pola kepemimpinan yang lebih responsif terhadap tuntutan kemajuan zaman. Pola tersebut haruslah mengarah pada kegiatan yang melibatkan lebih banyak orang lain lagi dalam jajaran kepemimpinan, untuk bersama-sama menjalankan roda organisasi pesantren menuju kondisi yang maju dan mapan, baik dari sisi kelembagaan, sistem pendidikan, proses pembelajaran, maupun-tentu saja-kaulitas santri.

Dari beberapa kasus perkembangan ini hendaknya dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan pesantren. Yaitu dari karismatik menuju rasionalistik, dari otoriter-paternalistik dari dipolomatik menuju-partisipatif atau dari laisesezfire menuju demokaratik. Gaya-gaya kepemimpinan yang diharapkan terwujud pengarah pada tipe kepemimpinan yang profesional yang memberi perhatian khusus pada partisipasi orang lain dalam menentukan pengembangan pesantren.(.(Mujamil Qomar, 2007)

Menurut Farhan dan Syarifuddin Ada beberapa alternatif solusi menata manajemen pesantren agar lebih maju antara lain : *Pertama* Mengadopsi manajemen modern K*edua* Membuat wirausaha *Ketiga* Melakukan pelatihan kewirausahaan *Keempat* Membuat network ekonomi.

Adapun solusi yang lain agar manajemen pesantren menjadi lebih maju antara lain :

1. Menerapkan manajemen secara profesional.
2. Menerapkan kepemimpinan yang kolektif
3. Menerapkan demokratisasi kepemimpinan
4. Menerapkan manajemen struktur
5. Menanamkan sosio-egalitarianisme

6. Menghidarkan pemahaman yang mensucikan agama
7. Memperkuat penguasaan epistimologi dan metodologi
8. Mengembangakan sentra-sentra perekonomian.
9. Mengadakan pembaruan secara kesinambungan.

Kasus yang ada pada beberapa pesantren telah membuktikan bahwa peranserta kiai dalam mengelola, mengembangkan dan menata pesantren sehingga dapat muncul sebagai sebuah lembaga yang dapat dijadikan pendidikan alternatif memiliki peranan yang sangat besar, sebab tidak jarang pesantren akan tutup dikarenakan oleh beberapa hal yakni: *pertama* kharismatika kiai di pesantren tersebut telah luntur bersama meninggalnya kiai utama sebagai pendirinya, *Kedua* tidak adanya pengganti yang dapat meneruskan estapet kepemimpinanya, *Ketiga* kesibukan kiai yang dapat mengabaikan proses belajar-mengajar *Keempat* kurang seimbangnya tuntutan kebutuhan belajar santri dengan pelayanan yang diberikan oleh pesantren tersebut. Menggaris bawahi tentang kurang seimbangnya tuntutan belajar santri dengan inovasi pelayanan pendidikan pada sebuah pesantren akan memungkinkan dampak yang paling buruk bagi perkembangan belajar santri yaitu kurangnya stabilitas proses belajar-mengajar yang senantiasa mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi hasil belajar. Kerangka pemikiran dibawah ini lebih menggambarkan sikap inovasi kepemimpinan kiai yang senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai tradisi, orientasi dan strategi untuk melihat kasus yang berkembang pada pesantren masa lalu, transisi dan masa sekarang sebagai ukuran inovasi pelayanan pendidikan dipesantren, sehingga tercipta desain pembaharuan yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan indikator pembaharuan sebagai modal dasar bagi terciptanya kualitas layanan pendidikan di pondok pesantren.

D. Peran Pesantren Dalam Proses Pembangunan Sosial

Jika melihat beberapa hasil studi yang dilakukan beberapa sarjana, seperti Dhofier (1870), Martin (1740), dan ilmuwan lainnya, ada indikasi bahwa munculnya pesantren tersebut diperkirakan sekitar abad ke-19. Akan tetapi, terlepas dari persoalan tersebut yang jelas signifikansi pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tidak dapat diabaikan dari kehidupan masyarakat muslim pada masa itu. Kiprah pesantren dalam berbagai hal sangat amat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi contoh utama adalah, selain pembentukan dan terbentuknya kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam, juga merupakan gerakan-gerakan protes terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di mana gerakan protes tersebut selalu dimotori dari dan oleh para penghuni pesantren. Setidaknya dapat disebutkanya misalnya; pemberontakan petani di Cilegon-Banten 1888, [8] Jihad Aceh 1873, gerakan yang dimotori oleh H. Ahmad Ripangi Kalisalak 1786-1875) dan yang lainnya merupakan fakta yang tidak dapat dibantah bahwa pesantren mempunyai peran yang cukup besar dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia.[9]

Apabila kita cermati, di Indonesia terdapat sekira 12.000 pesantren yang tersebar di seluruh nusantara dengan berbeda bentuk dan modelnya. Bahkan, dihuni tidak kurang dari tiga juta santri. Pendidikan Islam sekarang di Indonesia kini begitu luas. Sehingga, beranekaragam dan bagaimanapun aliran Islam yang dianut oleh seseorang, pasti ada pesantren atau sekolah Islam yang sesuai.dianut oleh seseorang, pasti ada pesantren atau sekolah Islam yang sesuai. Karena itu, menurut Tholkhah, pesantren seharusnya mampu menghidupkan fungsi-fungsi sebagai berikut, 1) pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al-din) dan nilai-nilai Islam (Islamic vaues); 2) pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial; dan 3) pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial

(social engineering) atau perkembangan masyarakat (community development).[10] (Aqib Suminto, 1985) Semua itu, menurutnya hanya bisa dilakukan jika pesantren mampu melakukan proses perawatan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehingga mampu memainkan peranan sebagai agent of change.

E. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Pondok Pesantren

Ketika menginjak abad ke-20, yang sering disebut sebagai jaman modernisme dan nasionalisme, peranan pesantren mulai mengalami pergeseran secara signifikan. Sebagian pengamat mengatakan bahwa semakin mundurnya peran pesantren di masyarakat disebabkan adanya dan begitu besarnya faktor politik Hindia Belanda. (Aqib Suminto , 1985) merupakan lembaga pendidikan yang tak tergantikan oleh lembaga pendidikan manapun. Dan, hal itu sampai sekarang masih tetap dipertahankan. Yang menarik di sini adalah bahwa pendidikan pesantren di Indonesia pada saat itu sama sekali belum terstandarisasi secara kurikulum dan tidak terorganisir sebagai satu jaringan pesantren Indonesia yang sistemik. Ini berarti bahwa setiap pesantren mempunyai kemandirian sendiri untuk menerapkan kurikulum dan mata pelajaran yang sesuai dengan aliran agama Islam yang mereka ikuti.

Manajemen mutu di Pondok Pesantren sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi pondasi operasional lembaga ini. Integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen mutu bukan sekadar tambahan, tetapi merupakan bagian inti dari seluruh aspek kegiatan pesantren, mencakup kurikulum, metode pengajaran, hingga evaluasi kinerja. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas di pesantren tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga mampu mencetak lulusan yang kompeten secara akademis dan memiliki karakter islami yang kuat (Syamsuddin, 2021; Shihab, 2023; Usman, 2022). sekarang ini

kebanyakan pesantren juga menawarkan mata pelajaran umum. Bahkan, banyak pesantren sekarang melaksanakan kurikulum Depdiknas dengan menggunakan sebuah rasio yang ditetapkannya, yaitu 70 persen mata pelajaran umum dan 30 persen mata pelajaran agama. Sekolah-sekolah Islam yang melaksanakan kurikulum Depdiknas ini kebanyakan di Madrasah. (Sulthon Masyhud, 2003)

Ternyata pesantren mampu mengembangkan kelembagaan dan eksistensi dirinya secara berkelanjutan. Mengutip Sayid Agil Siraj (2007), ada tiga hal yang belum dikuatkan dalam pesantren. Pertama, tamaddun yaitu memajukan pesantren. Banyak pesantren yang dikelola secara sederhana. Manajemen dan administrasinya masih bersifat kekeluargaan dan semuanya ditangani oleh kiainya. Dalam hal ini, pesantren perlu berbenah diri. Kedua, tsaqafah, yaitu bagaimana memberikan pencerahan kepada umat Islam agar kreatif-produktif, dengan tidak melupakan orisinalitas ajaran Islam. Salah satu contoh para santri masih setia dengan tradisi kepesantrenannya. Tetapi, mereka juga harus akrab dengan komputer dan berbagai ilmu pengetahuan serta sains modern lainnya. Ketiga, hadharah, yaitu membangun budaya. Dalam hal ini, bagaimana budaya kita dapat diwarnai oleh jiwa dan tradisi Islam. Di sini, pesantren diharap mampu mengembangkan dan mempengaruhi tradisi yang bersemangat Islam di tengah hembusan dan pengaruh dahsyat globalisasi yang berupaya menyeragamkan budaya melalui produk-produk teknologi.

F. Personalia Manajemen Pesantren

Ada lima elemen personalia manajemen pesantren dasar yang terdapat dalam tradisi pesantren. *Pertama* , santri. Santri dapat dikatakan sebagai komponen penting dalam dunia pesantren. Dalam tradisi pesantren santri terbagi dua: (l) *Santri mukim* yakni murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan bertempat tinggal di lingkungan pesantren atau pondok, dan (2) *santri kalong*, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren, yang biasanya tidak

menetap dalam pondok. *Kedua* kiai. Kiai merupakan komponen terpenting dalam kehidupan pesantren. la adalah pelopor bagi kelahiran pesantren yang dipimpinnya dan menjadi pemegang dan penentu kebijakan yang ada di seluruh pesantren. Pada tingkat tertentu, kemajuan dan perkembangan pesantren tergantung pada sang kiai. Para kiai di Pulau Jawa banyak menganggap bahwa pesantren itu bagai kerajaan kecil yang dimilikinya. Konsekuensi logisnya, kekuasaan mutlak dan wewenang dalam kehidupan dan lingkungan pesantren sepenuhnya ada di tangan kiai. Di pesantren, dengan demikian, kiai menjadi penguasa tunggal sehingga tidak bisa ditentang oleh siapa pun, kecuali oleh kiai yang memiliki pengaruh lebih besar. Para santri hanya menjadi orang yang mengharap dan berpikir bahwa kiai akan percaya penuh kepada dirinya sendiri, baik dalam soal-soal pengetahuan Islam, manajemen atau bidang kekuasaan di pesantren. *Ketiga,* pengurus adalah santri-santri senior yang diberi amanat oleh kyai untuk menglola santri dalam kepngurusan pesantren (Sulthon Masyhud, 2003)

G. Model Kepemimpinan Pesantren

Dengan masuknya disiplin ilmu manajemen modern dalam dunia pondok pesantren, maka memberikan warna terhadap perlunya pondok pesantren malakukan onovasi terutama mengenai visi misi dan manajemen kepemimpinannya, Azyumardi Azra (1986; 229) mengemukakan bahwa pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam indigenous, telah berusaha melakukan berbagai eksperimentasi untuk menyesuaikan dengan sistem pendidikan modern, terutama pada segi-segi yang berkaitan dengan masalah kurikulum, teknik dan methode pengajaran, hal ini diawali pada tahun 70-an, akan tetapi perubahan-perubahan tersebut ternyata tanpa melibatkan wacana epostimologi, akibatnya medernisasi dalam dunia pondok pesantren hanyalah berlangsung secara adhoc (parsiall, sebab itulah modernisasi yang dilakukan pesantren selama ini hanyalah bersifat involutiuf; yakni sekedar

perubahan-perubahan yang hanya memunculkan kerumitan baru dari pada terobosan-terobosan yang betul-betul bisa dipertanggung jawabkan, (Azyumardi Azra, 1999; 40).

Dalam penelitian lapangan Dhofier mengemukakan bahwa kyai dan pesantren telah memainkan peranan sebagai creative cultural makers dan dengan peran itulah kyai memainkan peranan yang sangat penting dalam konteks masyarakat muslim Indonesia modern, kyai dengan pesantrennya telah mampu menyumbangkan atas tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Indonesia yang distinetive, lebih lanjut dikatakan Dhofier bahwa problema pembaharuan dalam pesantren terjadi karena adanya kontradiksi pada sebagian pesantren berupa tarik menarik antara kalangan muslim tradisional dengan gayanya yang memiliki kecenderungan yang kuat untuk menemukan kembali nilai-nilai tradisional kemudian diinterprestasikan kembali sesuai dengan persepktif baru dan yang lebih menekankan nilai-nilai tradisional sebagaimana adanya, (Zamakhsyari Dhofier, 1982; 175-176). Pergeseran makna kepemimpinan dalam pondok pesantren telah memberikan nuansa yang berbeda terutama bila dilihat dari segi perencanaan dan kinerja produktivitas pesantrennya, walaupun mungkin memiliki kesamaan misi yang diemban oleh pesantren yang memiliki gaya kepemimpinan tradisional dengan gaya kepemimpinan pesantren yang modern yaitu membawa umat kepada jalan kebajikan.

Melihat dari lintasaan sejarah, kebanyakan kepemimpinan pondok pesantren tradisional dipegang oleh keluarga yang memiliki golongan darah biru, (Khaerul, 2001; 70), hal ini membuktikan bahwa hanya dari golongan terdekatlah yang dapat Dari kebanyakan pesantren modern yang ada, sekarang ini cenderung masih mempergunakan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada sistem tradisional, dan hal ini merupakan ciri dasar utama bagi pesantren, walaupun pada sisi lain mempergunakan gaya

dan desain yang modern hal ini dibuktikan oleh beberapa pondok pesantren yang ada. Dari sekian banyak pesantren yang ada, sistem yang dipergunakan dalam pesantren tersebut cenderung mengarah kepada maknisme dan kepemimpinan yang dapat disebut sebagai demokrasi terpimpin, sehingga salah satu ciri dari demokrasi seperti ini dapat berakibat bagi peralihan kepemimpinan kyai yang meninggal, sehingga lajim dikatakan bahwa selama kyai tersebut hidup maka tajuk kepemimpinan berada dibawah naungan sepenuhnya.

Terlepas dari ragam kepemimpinan pondok pesantren yang ada dan masing-masing memiliki corak dan gaya kepemiminan yang berbeda, sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai sejauh manakah gaya kepemimpinan pondok pesantren melakukan re-generasi dalam kepemimpinannya, serta sejauhmanakah re-generasi kepemimpinan tersebut mempengaruhi terhadap visi dan misi memimpin pondok pesantren, hal ini terbukti pada berberapa pesantren. yang diemban oleh pesantren sebagai lembaga pendidikan milik masyarakat (khususnya umat Islam), dan bagaimanakah tanggapan umat terhadap pesantren mekanisme dan kinerja pesantren yang melakukan re-generasi kepemimpinannya, juga dari efektifitasnya sehingga kesan utama yang akan timbul, maka sejauh manakah pesantren modern telah melakukan inovasi bagi kelanjutan pesantren tersebut.

H. **Pondok Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Islam**

Pada dasarnya Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis Islam yang ada di Indonesia, yang di dalamnya mengajarkan berbagai macam pelajaran keagamaan mengenai islam dan sebagai salah satu lembaga yang berperan banyak dalam pendidikan moral dan akhlak

yang mulia bagi para santri di dalamnya. Pondok pesantren yang ada di Indonesia memiliki sejarah yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan pondok pesantren yang ada di negeri lain.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Indonesia), Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat (*indigenous*) pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*) serta memiliki model pendidikan multi aspek, sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren telah memainkan peranan yang besar dalam usaha memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, membina akhlaq mulia, mengembangkan swadaya masyarakat Indonesia ikut serta menderdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan informal, non-formal dan formal.(Fitri & Ondeng, 2022)

Pondok pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia yang telah menjadi tonggak penting dalam membangun peradaban Islam. Sejak berdirinya, pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral masyarakat. Para santri dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai Al-Qur'an, hadis, dan berbagai disiplin ilmu Islam, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Tradisi keilmuan yang berkembang di pesantren, seperti kajian kitab kuning dan halaqah, menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan tradisi keislaman sekaligus menjawab tantangan zaman.

Selain itu, pondok pesantren juga berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan berbasis kearifan lokal, pesantren menjadi ruang bagi terciptanya harmoni sosial, penguatan ekonomi, dan pelestarian budaya Islam. Berbagai program seperti pelatihan

kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, dan kegiatan sosial lainnya menunjukkan bahwa pesantren mampu menjadi motor penggerak kemajuan masyarakat. Dalam konteks peradaban Islam, pondok pesantren adalah simbol sinergi antara keimanan, ilmu pengetahuan, dan amal, yang mampu melahirkan generasi berintegritas, kreatif, dan memiliki kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, pesantren tetap relevan sebagai pusat peradaban

BAB V
HALAQAH FIKIH PERADABAN DI PONDOK PESANTREN

A. Halaqah Fikih Peradaban Di Pondok Pesantren Sebagai Pusat Pembaruan Pemikiran Islam

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat (indigenous) pada masyarakat muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (survival system) serta memiliki model pendidikan multi aspek. Santri tidak hanya dididik menjadi seseorang yang mengerti ilmuagama, tetapi juga mendapat tempaan kepemimpinan yang alami, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, kesetaraan, dan sikap positif lainnya. Modal inilah yang diharapkan melahirkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri sebagai bentuk partisipasi pesantren dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional sekaligus berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.(Amin, 2004)

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara. (Azyumardi Azra, 2005) Arifin merumuskan bahwa Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang

tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadershipseorang atau beberapa orang Kyai dengan ciri khas yang bersifat kharismatis serta independen dalam segala hal.(M. Arifin, 2000) Marwan Raharjo mengemukakan bahwa pondok pesantren disamping merupakan lembaga pendidikan, juga merupakan lembaga kemasyarakatan. Karena itu beliau merumuskan pondok pesantren sebagai lembaga sosial yang memiliki hubungan fungsional dengan masyarakat dan hubungan tata nilai dengan kultur masyarakat.(M. Dawan Raharjo , 1995)

Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, menurut Djamaludin pondok pesantren dari sudut historis-kultural dapat dikatakan sebagai training centeryang otomatis menjadi kultural center Islam yang disahkan dan dilembagakan oleh masyarakat Islam sendiri yang tentunya hal itu tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Dengan demikian jelaslah pondok pesantren merupakan suatu sistem pendidikan Islam yang tertua di negara kita yang umurnya sudah ratusan tahun.Kini pesantren bukan saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga keagamaan dan lembaga sosial. Peran pesantren pun melebar menjadi agen pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Santri dan juga lembaga pesantrennya telah mampu memasuki segala lini bidang kehidupan, baik sosial, politik maupun kemasyarakatan.

Pondok pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat pembelajaran Islam yang dinamis dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui halaqah fikih peradaban, pesantren dapat menjadi motor pembaruan pemikiran Islam dengan menanggapi isu-isu kontemporer secara konstruktif dan solutif. Fikih peradaban tidak hanya mengkaji hukum-hukum dasar Islam, tetapi juga memperluas pembahasannya untuk mendefinisikan pandangan Islam terhadap berbagai aspek

kehidupan modern, seperti teknologi, ekonomi global, lingkungan, dan politik. Pesantren dapat menggunakan halaqah sebagai forum diskusi penting untuk mendorong santri memahami dan mengembangkan solusi berbasis syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, tanpa kehilangan esensi ajaran Islam yang telah lama dipertahankan

B. Halaqah Fiqih Peradaban Di Lingkungan Pesantren

Halaqah (حلقة) adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti lingkaran atau kelompok. Dalam konteks pembelajaran dan keagamaan, halaqah merujuk pada kelompok belajar atau pertemuan diskusi yang biasanya dilakukan untuk mempelajari ilmu agama, seperti Al-Qur'an, hadits, atau kajian Islam lainnya. Istilah halaqah yang dikemukakan oleh Hanun Asrohah merupakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan peserta didik dengan melingkari guru yang bersangkutan.(Hanun Asrohah , 1994) Ibnu Bathuthah melaporkan bahwa pada akhir tahun 728 H (1326 M), ia menyaksikan sebuah kejadian yang terjadi pada malam hari kegiatan keilmuan yang diselenggarakan di masjid Nabawi, dimana ulama dan peserta didik membentuk halaqah, lengkap dengan al-Qur'an dan kitabkitab lain sebagai sumber belajar.(Azyumardi Azra , 1994)

Menurut Hasnun Asrohah, halaqah adalah proses pendidikan atau proses transfer ilmu dengan cara guru duduk ditengah sedangkan murid duduk melingkarinya atau membentuk leter U dan peserta didik duduk berhadapan dengan wajah guru.Menurut alwi, halaqah adalah bentuk setrategi pembelajaran yang model formasinya, guru duduk ditengah sedangkan murid duduk bersimpuh melingkari menghadap kepada guru. Menurut hasbullah, Halaqoh atau yang disebut dengan istilah wetonan merupakan proses pembelajaran dimana terdapat seorang guru atau kiai duduk ditengah tengah peresrta didik yang telah duduk membuat lingkaran.Halaqah ini tentunya memiliki fungsi meningkatkan rasa persaudaraan satu sama lain dikarenakan terjadi interaksi satu sama lai disaat pembelajaran berlangsung.

Selain itu sebagai tempat perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Dikarenakan dalam pelaksanaannya sebuah halaqoh orang yang mengikuti halaqah bebas bertanya mengenai tema yang diangkat jika ada yang tidak dipahami sedangkan yang lain dapat menjawab dikuatkan dengan melontarkan argumen argumennya. Mengenai konsep dasar halaqah yakni setiap peserta didik memasuki ruangan tempat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pada umumnya bertempat di tempat yang luas kemudian peserta didik datang duduk melingkan dengan membawa kitab sesuai dengan mata pelajaran dan pelajar semuanya menghadap ke arah guru, sedangkan guru juga duduk berhadapan dengan para pelajar. Biasanya guru atau kiyai dan pelajar harus memegang kitab, seperti kitab fathal qarib.

Sistem halaqoh tidak memiliki ketentuan waktu kapan harus dilaksanakan, kapan dimulai dan diselesaikan seperti pada proses pembelajaran modern. Metode pembelajaran halaqah berlangsung dengan cara guru membuka dan menjelaskan materi pelajaran kepada murid-muridnya. Sementara itu, para murid dengan seksama memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Sistem ini, meskipun merupakan bagian dari tradisi pembelajaran dalam halaqah, memiliki kesamaan dengan metode yang diterapkan di sekolah atau perguruan tinggi pada masa sekarang. Hanya perbedaanyha dengan sistem halaqoh peserta didik fokus dengan kitab masing masing yang mereka bawa, sedangkan sistem modern seperti disekolahan murid mencatat apa yang disampaikan guru atau buku pelajaran yang telah disediakan.

Akhir-akhir ini, Fikih Peradaban mulai hangat diperbincangkan di Indonesia dalam ruang-ruang akademik para akademisi, maupun halaqah-halaqah ilmiah para ulama di pesantren.. Nomenklatur Fikih Peradaban mengemuka setelah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Yahya Cholil Staquf, melontarkan gagasan pentingnya melakukan transformasi fikih dari paradigma konvensional ke

arah paradigma baru, yaitu Fikih Peradaban. Fikih Peradaban ini diniatkan sebagai perwujudan karakter dinamis fikih yang akan merespons perubahan-perubahan lingkungan.

Perbincangan Fikih Peradaban sebenarnya sudah lama dimulai dalam lanskap kajian-kajian ilmiah di Timur Tengah. Sebuah buku berjudul Fiqh al-Tahaddhur al-Islâmi yang ditulis oleh seorang aktivis pergerakan, politikus, sekaligus akademisi di Tunisia yaitu Abdul Majid Al-Najjar. Buku ini terdiri dari tiga bagian yang secara sistematis membahas isu-isu yang terbingkai dalam diskursus Fikih Peradaban. Dalam buku ini, Al-Najjar telah merancang paradigma dan karakteristik 2 Bunga Rampai Fikih Peradaban & Isu-Isu Global.

Lahirnya gagasan Fikih Peradaban di Timur Tengah dilatari oleh fakta keterbelakangan Islam ketika dihadapkan pada budaya Eropa yang maju dan berkembang. Beberapa faktor penghambat dan pendorong kebangkitan Islam diidentifikasi dan telah melahirkan beberapa formulasi jalan kebangkitan. Muncul beberapa model kebangkitan Islam seperti gerakan salafiyah yang mencakup gerakan-gerakan Wahabiyah, Sanusiyah, dan Mahdiyah. Juga gerakan kemerdekaan yang menghimpun banyak sekali pembaharu seperti Rifat Tahtawi, Bunga Rampai Fikih Peradaban & Isu-Isu Global 3 Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, Kawakibi, Khairuddin alTunisi, dan Ibn Badis.

Menjelang satu abad Nahlatul ulama Pengurus besar Nahdlatul ulama (PBNU) menggagas sebuah ide mengadakan halaqoh fiqh peradaban Fiqh peradaban. Secara keseluruhan Halaqah dilaksanakan di 250 titik se-Indonesia. Dimulai digelar di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, pada 11 Agustus 2022.Gagasan Halaqoh sudah pernah digelar di era kepimimpinan KH Abdurahman Wahid. Halaqoh pada masa Gus Dur Bertajuk Halaqah Rekontekstualisasi Kitab Kuning. Tujuan diadakannya fiqih peradaban Gus Ulil mengungkapkan, sejatinya halaqah ini memiliki dua tujuan, yaitu menghidupkan tradisi halaqah di era Gus Dur dan

mendorong kiai-kiai di lingkungan NU untuk mengeksplorasi lebih dalam kitab-kitab fiqih, terutama fiqih siyasah.Salah satu kekuatan komunitas ilmiah di lingkungan pesantren-pesantren Nahdliyin adalah adanya warisan intelektual yang tertuang dalam kitab-kitab klasik, yaitu kitab kuning. Warisan-warisan pemikiran ini tergambar, antara lain dalam literatur fiqih siyasah, yaitu fiqih yang berkenaan dengan masalah kenegaraan.

Dikutip dari laman nu online Gus Ulil menyebut KH Masdar Farid Mas'udi yang ditunjuk Gus Dur sebagai penanggung jawab halaqah memiliki peran besar karena melahirkan beberapa kiai pemikir. Di antaranya KH Abdul Wahid Zaini dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, ada KH Husein Muhammad dari Cirebon, Kiai Ubaidillah Shodaqoh (kini Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah), dan KH Malik Madani, Ia menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memiliki filosofi mengenai gelaran Halaqah Fiqih Peradaban ini, yakni hal terpenting bukanlah hasil akhir tetapi justru prosesnya. Proses itu adalah mengajak kiai-kiai NU untuk diskusi. Karena memang, halaqah ini merupakan forumnya para kiai atau jajaran syuriyah di NU.

A. Halaqah Fiqih Peradaban Dalam Konteks Keindonesiaan Dan Moderasi Beragama

Fikih progresif atau juga bisa disebut Fikih peradaban dapat dipahami sebagai pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang mengatur problematika manusia modern di mana pengetahuan tersebut dinukil dari dalil-dalil tafsiliyah. Fikih progresif merupakan hukum-hukum syariat Islam yang cenderung memihak kaum minoritas, rakyat yang tertindas, atau untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan hegemonik yang tidak adil (Nugroho, 2015). Fikih Progresif sejalan dengan Fikih sosial yang diusung oleh KH Sahal Mahfudh di mana Fikih bertanggungjawab terhadap tata laku manusia supaya tetap berjalan pada koridor kebajikan

serta tidak mengganggu pihak lain sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Halaqah fikih peradaban dalam konteks keindonesiaan merupakan upaya strategi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan karakter kebangsaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan suku, Indonesia membutuhkan pendekatan fikih yang mampu menjawab tantangan lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip universal Islam. Melalui halaqah ini, para ulama, kiai, dan santri dapat membahas isu-isu seperti toleransi beragama, keadilan sosial, perlindungan hak minoritas, serta pembangunan berkelanjutan dalam bingkai nilai-nilai keislaman. Dengan menumbuhkan semangat moderasi dan harmoni, halaqah fikih peradaban mampu menjadi wadah untuk melahirkan pemikiran yang kontekstual dan solutif, sehingga Islam di Indonesia tetap relevan dan mampu berkontribusi bangsa Indonesia.

Moderasi beragama merupakan agenda yang digencarkan oleh Kemenag RI sebagai upaya menjaga persatuan Indonesia. Kementerian Agama mendefinisikan moderasi beragama sebagai paradigma berpikir, perilaku, dan sikap mengambil jalan tengah, bertindak adil, serta tidak ekstrem dalam beragama Hal ini menjadi penting mengingat gerakan Islam transnasional yang cenderung puritan dan menganggap segala bentuk tradisi, budaya, dan nilai luhur bangsa Indonesia sebagai bentuk kesyirikan pun semakin marak (Muhtarom et al., 2020). Di sinilah Fikih memainkan peran pentingnya untuk menciptakan hukum-hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan di mana tindak intoleransi dan ekstremisme sering kali dilatarbelakangi oleh penafsiran teks-teks keagamaan yang literal dan skriptual, tidak melihat konteks yang semakin berkembang.

Era kontemporer Indonesia ditandai dengan pelbagai perubahan secara mendasar dalam lingkup

kehidupan termasuk dalam ruang keagamaan. Menggaungnya isu radikalisme, terorisme, intoleransi, bahkan kekerasan atas nama agama dalam konteks masyarakat Islam menunjukkan bahwa perlu adanya paradigma humanis yang berorientasi pada jalan damai dalam praktik keagamaan. Ibnudin mengatakan bahwa sikap pertama yang perlu ditanamkan dalam paradigma ini adalah moderasi.

Istilah moderasi atau dalam Bahasa Islamnya "wasathiyah" dapat dilihat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 143. Ayat tersebut berarti "Dan demikian (pula) Kami menjadikan kamu (umat Islam) ummatan wasathan (umat yang adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan manusia) dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...". Dalam surah tersebut terdapat term ummatan wasathan. Kata wasath menurut kamus Al-Munawwir dan kamus Al-Qalam memiliki beberapa pengertian seperti tengah, pertengahan, jalan tengah, moderat, dan seimbang antara dua hal. Definisi tersebut menunjukkan makna bahwa ummatan wasathan merupakan umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderasi, adil, dan proporsional baik dalam urusan materil maupun spiritual.

Halaqah Fikih Peradaban dalam Konteks Keindonesiaan dan Moderasi Beragama merupakan Halaqah fikih peradaban dalam konteks keindonesiaan menjadi wadah strategis untuk merumuskan pendekatan keislaman yang sejalan dengan karakter bangsa Indonesia yang multikultural dan beragam. Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim yang hidup berdampingan dengan berbagai agama dan budaya lain, Indonesia membutuhkan fikih yang adaptif dan kontekstual. Halaqah ini berfungsi untuk mengkaji isu-isu kontemporer, seperti toleransi, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan, dengan pendekatan yang moderat dan solutif. Dengan memadukan ajaran Islam dan nilai-nilai lokal seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, halaqah ini dapat menghasilkan pedoman-pedoman fikih yang relevan untuk membangun harmoni sosial, menjaga persatuan

bangsa, dan merespons dinamika global secara bijaksana.

Dalam kaitannya dengan moderasi beragama, halaqah fikih peradaban memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai wasathiyah (sikap moderat) yang menjadi ciri khas Islam di Indonesia. Moderasi beragama menekankan sikap keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga mampu mencegah sikap ekstremisme dan radikalisme. Melalui diskusi dan kajian dalam halaqah, para ulama, santri, dan tokoh masyarakat dapat menggali solusi berbasis syariah yang mengedepankan kemaslahatan umat tanpa mengabaikan keberagaman yang ada. Dengan demikian, halaqah ini tidak hanya menjadi sarana pengembangan pemikiran Islam yang kontekstual tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat moderasi beragama sebagai landasan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

D. Halaqah Fikih Peradaban sebagai Wadah NU Menanggapi Isu-Isu Kontemporer

Agenda halaqah Fikih peradaban untuk menyambut satu abad Nahdlatul Ulama menjadi momen yang fundamental bagi pesantren di Indonesia. Keterbukaan terhadap ide-ide progresif dalam melihat realitas kontemporer seperti multikulturalisme, pluralisme, dan relasi mayoritas-minoritas dalam negara bangsa menolak narasi bahwa pesantren merupakan lembaga yang terkesan tradisional, eksklusif, dan konservatif (Nasruddin, 2022), Halaqah Fikih Peradaban yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) di pondok pesantren merupakan upaya strategis untuk merespons berbagai isu kontemporer dalam kehidupan umat Islam.

Forum ini menjadi ruang diskusi yang melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi untuk membahas permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat, seperti isu lingkungan, keadilan sosial, politik, dan ekonomi syariah. Dengan pendekatan berbasis fikih peradaban, halaqah ini tidak

hanya memberikan jawaban teoretis, tetapi juga solusi praktis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan relevan dengan tantangan zaman. Dalam bingkai tradisi pesantren, kegiatan ini mempertemukan warisan keilmuan klasik dengan realitas modern sehingga menghasilkan perspektif yang komprehensif dan inovatif.

Selain sebagai sarana intelektual, halaqah ini juga memperkuat peran pesantren sebagai pusat pengembangan peradaban Islam yang dinamis. Melalui diskusi dan keputusan yang dihasilkan, halaqah ini membantu mengarahkan umat Islam untuk mengambil sikap yang tepat terhadap berbagai perubahan global. Misalnya, dalam menghadapi isu perubahan iklim, halaqah dapat menghasilkan panduan etis berbasis fikih untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, halaqah fikih peradaban tidak hanya menjadi medium transfer ilmu, tetapi juga bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berdaya saing di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks.

BAB VI

PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ISLAM RAHMATAN LIL`ALAMIN BERDASARKAN PANCASILA

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang fokus pada bidang agama, pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Sejak awal berdirinya, NU selalu memberikan kontribusi dan peran penting, mulai dari memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan hingga berperan aktif dalam pembangunan berbagai bidang. (Farih, 2016)

Sepanjang sejarah, Nahdaltul Ulama berperan penting dalam menyebarkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Buktinya adalah masuknya Islam secara damai dan penuh gairah ke nusantara oleh para ulama dan mubaligh dari kalangan Aswaja. Mereka menyebarkan ajaran Islam dengan santun dan selaras dengan tradisi setempat, sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat setempat.(Nur Khalik & Ali, 2023)

Selain Para kiai NU telah banyak mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan Islam, mereka mengajarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. Selain itu, keteladanan yang mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan

bukti nyata betapa ramah dan penuh kasih sayang ajaran Islam, sehingga setiap orang dapat memahami dan mengamalkan Islam dengan lebih mudah.Uraian ditas Selaras dengan yang kutipan wawancara dengan salah satu pengurus PBNU

Nahdlatul Ulama (NU) bertanggung jawab atas pengaturan kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, moderasi, dan toleransi. NU mengajarkan ajaran Islam yang moderat dengan pemahaman yang mendalam tentang fiqh, akidah, dan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Hal ini membantu membangun masyarakat yang taat beragama, menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan menghargai perbedaan. Selain itu, organisasi NU melakukan aktivitas di bidang sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat.

1. **Membangun Karakter Nilai-Nilai Islam Rahmatan lil 'Alamin melalui kasih sayang, damai dalam pertentangan dan menjalin kerukunan.**

   Rahmatan lil alamin menekankan kasih sayang kepada seluruh makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Umat Islam diajarkan untuk berperilaku lembut, membantu sesama, dan menjaga keberlanjutan, Karena hati cenderung mengalami perubahan atau fluktuasi, diperlukan perawatan yang rutin dan baik untuk mempertahankan kualitas perasaan tersebut.(Prathama & Mahadwistha, 2024)

   Islam dijuluki sebagai agama yang damai dan penuh kasih sayang, sejalan dengan julukan Rahmatan Lil Alamin, yang berarti agama yang penuh rahmat. Kedamaian, ketenangan, rasa aman, dan kasih sayang dibawa oleh Islam tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam. Selain rahmatan lil „alamin artinya Islam merupakan agama yang

membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan,tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang rahmatan lil „alamin sebenarnya (Wahab Syakhrani & Rivaldi Yudistira, 2022)

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), konsep rahmatan lil 'alamin, atau Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, memiliki makna yang mendalam dan menjadi prinsip dasar dalam menjalankan berbagai aktivitas keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan. NU menyadari bahwa Islam bermanfaat bagi semua orang, termasuk orang Muslim hal ini disampaikan dalam oleh satu pengurus PBNU KH Mahbub Maafi

"Nilai-nilai rahmatan lil kan sudah ada sejak dulu dan masih dipertahankan sampai sekarang yach contoh simpelnya rasa kasih sayang ,hidup damai, rukun terhadap tetangga itu itu untuk kemasalahan banyak orang sehingga bangsa ini menjadi baldatun toyibabun ghafur"

Dari penjelasan tersebut Nahdlatul Ulama memaknai Rahmatan lil alamin sebagai Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmat untuk semua orang, tidak hanya mereka yang beragama Muslim, tetapi juga untuk semua manusia dan makhluk hidup di Bumi.

Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan Islam adalah membawa kedamaian, kasih sayang, dan kesejahteraan kepada semua orang, tidak peduli agama, suku, atau ras mereka. NU percaya bahwa umat Muslim dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat secara keseluruhan, dengan menerapkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan mengedepankan toleransi.

Nahdlatul Ulama (NU) sangat berperan dalam menanamkan konsep rahmatan lil 'alamin, yang berarti Islam

sebagai rahmat bagi seluruh alam, melalui berbagai upaya dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. NU menyebarkan Islam yang moderat dan inklusif melalui dakwahnya yang menekankan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Metode ini digunakan oleh NU untuk membangun harmoni antarumat beragama, menekankan bahwa Islam bukanlah agama yang eksklusif, tetapi agama yang membawa kebaikan dan kedamaian kepada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Hal ini ditunjukkan oleh aktivitas NU yang aktif mendorong percakapan antaragama, penyelesaian konflik sosial, dan perlindungan keutuhan bangsa.

Dalam kontek saat ini, Demi kemaslahan bangsa dan negara NU berperan aktif menyebarkan Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai representasi ajaran Aswaja menekankan pendekatan kasih sayang, rukun cinta damai dan menghindari ekstremisme dalam transmisi nilai-nilai Islam. Inti wawancara tersebut penulis kemukakan ada tiga poin penting NU dalam menerapakan rahmatan lil alamain

Pertama Nilai Rahmah (Kasih Sayang) Rahmah atau Kasih saying sudah diperintah Allah kepada umat manusia untuk senantiasa memiliki sifat *rahmah*, yaitu sikap penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk, baik manusia maupun makhluk lainnya. karena mereka yang memiliki kasih sayang akan selalu berusaha memberikan kebaikan kepada yang disayangi. Ini menjadi salah satu bukti nyata dari kebesaran kasih sayang ilahi kepada seluruh ciptaan-Nya (Nasrullah, Bahaking Rama, 2023) Kasih sayang merupakan anugrah tuhan yang sangat penting dan komprehensif dalam Islam, mencakup semua aspek kehidupan. Secara umum Islam mengajarkan bahwa cinta dalam hubungan antar manusia, termasuk hubungan keluarga, persahabatan, dan hubungan dengan Tuhan.

Penerapan Nilai Nilai Kasih sayang kepada mahluk telah yang disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang memaparkan beberapa kriteria yang mencerminkan sifat ulama. Salah satunya adalah kemampuan ulama dalam memandang orang dengan mata penuh kasih sayang. Orang yang beragama benar selalu berusaha memberikan kemaslahatan kepada umatnya dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan ketertiban masyarakat. "*Al-ulama yanzhuruna ilal ummah bi 'aynir rahmah*", artinya ulama memandang setiap orang dengan mata kasih sayang, menitikberatkan pada kesejahteraan umat secara keseluruhan, tidak terpengaruh oleh emosi atau kepentingan pribadi yang sempit. (Sumber NU Online, 2022)

Pernyataan tersebut menggambarkan hakikat peran ulama sejati dalam menyebarkan Islam hendaknya dengan kasih sayang , santun, lembah lembut terhadap makhluk hidup dan mempunyai tanggung jawab moral dan spiritual untuk melindungi kesejahteraan umat dan menjamin keharmonisan sosial dalam berbangsa dan bernegara. Penerapan Kasih Sayang terhadap makhluk hidup merupakan pemenuhan nilai Islam rahmatan lil alamin. NU menunjukkan kepeduliannya dalam berbagai bentuk, termasuk kepedulian terhadap sesama, lingkungan hidup, dan seluruh ciptaan Tuhan.

Nahdlatul Ulama (NU) menjadi teladan dan terdepan dalam penerapan nilai-nilai kasih sayang ini dengan menunjukkan kepedulian yang luas terhadap sesama manusia, lingkungan, dan seluruh ciptaan Tuhan. NU tidak hanya mendorong solidaritas sosial melalui bantuan kepada sesama, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap alam. Sikap ini menunjukkan implementasi nyata dari konsep rahmatan lil 'alamin, di mana kasih sayang tidak hanya diwujudkan dalam hubungan antar manusia, tetapi juga

terhadap semua makhluk yang ada di bumi. Dengan cara ini, NU memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan berkelanjutan.

Kedua Nilai-nilai rahmatan lil alamin selanjutnya yang diterapkan Nahdlatul Ulama (NU) yaitu mengedepankan pendekatan islah (perdamaian) dalam pertentangan dalam menghadapi dan menyelesaikan dinamika permasalahan konflik baik berupa konflik agama,budaya, politik dan lain-lain , hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian dan tidak melakukan tindakan kekerasan, karena tindakan kekerasan hanya akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Umat Islam diminta memahami kembali hakikat Islam sebagai agama yang membawa perdamaian dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan.

Damai dalam pertentangan merupakan ketika pendapat yang berbeda, konflik, atau pertentangan antara individu atau kelompok tetap dikelola dengan cara yang damai, tanpa kekerasan, dan dengan rasa saling menghormati. Dalam situasi ini, perbedaan tidak dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari dinamika yang dapat ditangani melalui pembicaraan, toleransi, dan kolaborasi. Metode ini memungkinkan penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, yang memastikan bahwa hubungan sosial tetap harmonis meskipun ada perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat dalam fikih adalah suatu keniscayaan yang terjadi karena adanya keragaman metode istinbat hukum (pengambilan hukum) yang digunakan oleh para ulama dalam memahami dan menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti perbedaan latar belakang keilmuan, konteks sosial dan budaya, serta kondisi zaman yang dihadapi masing-masing ulama. Perbedaan ini bukanlah kelemahan, melainkan

kekayaan intelektual Islam yang menunjukkan fleksibilitas dan dinamika hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan kebutuhan umat. Dalam konteks ini, umat Islam diajarkan untuk saling menghormati perbedaan pendapat dan mengedepankan persatuan serta toleransi. Sikap ini penting agar keragaman pandangan tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru memperkaya pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.Sebagimana diungkapan oleh seorang Pengurus PBNU KH Mahbub Maafi

Dalam kajian fikih terkadang banyak para ulama beda kan ada imam syafi'i, maliki, hambali, dan Hanafi berbeda pendapat hal yang biasa maka kita harus bijak dalam istinbat hukum di sini perlunya penegakkan damai di tengah pertentangan pendapat dan saling pengertian di tengah perbedaan ajaran , amalan dan paham yang lain.

Dalam menghadapi perbedaan ini, umat Islam dituntut untuk bersikap bijak dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling menghormati. Pentingnya penegakan perdamaian di tengah perbedaan ajaran, amalan, dan paham menjadi kunci agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik. Dengan saling pengertian, umat dapat bersatu dalam keberagaman, menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk belajar dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sikap ini mencerminkan esensi ajaran Islam yang mendorong kedamaian, persaudaraan, dan kemuliaan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat.

Gus Yahya mendorong semua pihak untuk mencari jalan perdamaian melalui pendekatan keagamaan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama.Menurutnya, memahami apa yang terjadi saat ini memerlukan kesepakatan mendasar untuk tidak mengingkari sejarah. Gus Yahya juga menekankan pentingnya mengakui nasib bersama umat manusia dan mengatakan bahwa saudara sebangsa harus berupaya mencari solusi untuk menghilangkan konflik**. (Sumber NU Online : 2024)**

Ketiga Penerapan Rahmatan lil alamin yang selanjutnhya adalah menjalin kerukunan, Rukunan dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima satu sama lain apa adanya. Kerukunan berkaitan dengan perilaku yang tidak terlepas dari etika, yang berakar kuat dan tercermin dari ajaran agama yang dianut. Hidup rukun mencerminkan adanya saling tenggang rasa dan kelapangan hati antara individu dalam menjalin hubungan baik dengan sesama (Ridawan Lubis : 2025) Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu pengurus PBNU KH Mahbub Maafi yang mengatakan

saya sudah lama jadi pengurus NU menurut ku sih rahmatan lil alamin yang selama ini saya pahami yang paling penting saling pengertian jaga kerukunan sama tangga meskipun beda agama , suku budaya dan ingat !! menghormati orang lain ini akan damai hidup kita.

Dari pernyataan tersebut dapat penulis pahami bahwa NU dalam menanamkan rahmatan lil alaamin berperan aktif dalam mengajarkan setiap orang untuk menjaga rukunan beragama dengan menerapkan nilai-nilai Rahman lil alamin saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi sehinga tercipa Masyarakat yang madani, harmoni yang saling bersinergi dalam hidup bermasyarakat, Mengingat Masyarakat Indonesia ini masyarkat multikulral yang beraneka ragama seperti bahasa, suku, keyakinan, warna kulit, budaya, kepentingan seni, pilihan politik, dan lain-lain, maka kebaikan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk interaksi sosial.

Permasalahan kerukunan telah disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden dan sekaligus Mantan Rais Am PBNU KH. Maruf Amin menegaskan, Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Keberagaman ini apabila dipupuk dengan baik dalam semangat kerukunan dan persaudaraan, dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan nasional. Namun jika keberagaman ini tidak dijaga maka konflik dan perpecahan

dapat terjadi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan bangsa perlu dilakukan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. (Sumber NU Online : 2023)

Pernyataan diatas dibenarkan dengan wawancara penulis dengan salah satu warga NU Ibu Alawiyah

"saya sebagai warga NU masalah kerukunan ya benar-benar diterapkan dalam hidup bermasyarakat sehingga kami bisa hidup berdampingan dan aman-aman saja tidak pernah ada perpecahan apalagi kekerasan"

Penjelasan wawancara menurut penulis NU sangat berperan aktif dalam membangun kerukunan dan keharmonisan sosial dalam menuju kehidupan masyarakat yang rukun dan damai salain itu NU menjalin hubungan baik antarmanusia, meski berbeda agama, suku, budaya, dan latar belakang Dalam konteks ini sejalan keberagaman yang ada di Indonesia sebagai menjadi landasan dan pijakan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Harmoni dapat dicapai melalui sikap saling menghormati dan menghargai. Misalnya, masyarakat yang berbeda keyakinan bisa hidup berdampingan dengan menjaga toleransi, tidak saling mengganggu ibadah, dan saling mendukung dalam kegiatan sosial.

Dengan demikian, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekayaan yang mempererat persatuan. Selanjutnya penerapan kerukunan terdapat dalam kegiatan gotong royong. Ketika ada kebutuhan bersama, seperti pembangunan fasilitas umum atau bantuan bencana, masyarakat dari berbagai latar belakang bekerja sama, apapun posisinya. Toleransi dan empati merupakan faktor penting dalam menjaga hubungan baik antar manusia.

2. Penguatan Tradisi Halaqah Fikih Peradaban Dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama.

Saat ini, fiqh peradaban Indonesia sedang hangat diperbincangkan tidak hanya di halaqah fikih peradaban dikalangan ulama di pesantren, namun juga di ruang

akademik para ulama. Nomenklatur Fiqh Peradaban muncul setelah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Yahya Çoril Stakuf mengemukakan gagasan penting untuk melakukan transformasi yurisprudensi dari paradigma tradisional ke paradigma baru: yurisprudensi peradaban. Peradaban Fiqih bertujuan untuk mewujudkan sifat dinamis Fiqih dalam menyikapi perubahan lingkungan.(Anis Mashduki , 2021)

Selain itu KH Ulil Abshar Abdallah mengatakan, halaqah fikih peradaban merupakan salah satu program utama kepengurusan PBNU saat ini. Hal ini mendorong Kiai untuk berpikir lebih dinamis. Sebab, tujuan utama halaqah ini adalah untuk mengajak para kiai berpikir kritis, berdialog dengan pemahaman Islam yang diajarkan dalam Kitab Klasik dan realitas peradaban modern. Gus Ulil menegaskan, Kitab pesantren bukan sekadar selembar kertas, namun memiliki makna penting dalam membentuk cara pandang di lingkungan NU.(Sumber NU Online, 2022)

Nahdlatul Ulama (NU) telah lama berada di puncak pengembangan pemikiran Islam yang kontekstual dan relevan dengan dinamika zaman. Di pondok pesantren, fikih peradaban yang diintegrasikan adalah salah satu inisiatif terbaru yang menonjol. Fikih peradaban ini berusaha menggunakan pendekatan Islam yang rahmatan lil 'alamin untuk menangani tantangan global dan local seperti Pelaksanakan fikih peradaban di Pesantren Arrisalah Cisarua sebagaimana pengasuh Arrisalah memaparkan tentang halaqah fikih peradaban

Dipesantren kami arrisalah pernah ada halaqah fikih peradaban dengan tema Ijithad Ulama Nu dalam Bidang sosial ya mengkaji tentang wastahiyah pentingnya untuk membangun sikap beragama dengan menerapkan nilai nilai toleransi, nasionalisme, itu dipenting agar peserta atau santri tidak hanya dibekali agama saja tapi dibekali tentang wathaniyah dalam hidup berbangsa dan bernegara serta mengajak para kiai untuk bersedia berpikir dan berdialektika sejalan dengan tradisi berfikir ilmu yang dimiliki Oleh

Ulama NU (Pengasuh Pon-Pes Arrisalah)

Pesantren Arrisalah pernah mengadakan Halaqah Fikih Peradaban yang mengangkat tema "Ijtihad Ulama NU dalam Bidang Sosial." Kegiatan ini bertujuan mengkaji pentingnya wathaniyah atau nasionalisme dalam konteks moderasi beragama dan kehidupan bernegara. Melalui halaqah ini, santri atau peserta tidak hanya dibekali pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga wawasan kebangsaan yang mendukung peran mereka dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara. Nilai-nilai wathaniyah yang diajarkan diharapkan menjadi fondasi bagi santri untuk berkontribusi aktif dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang toleran dan harmonis.

Dari Paparan tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika *(berbeda-beda namun tetap satu),* Dalam konteks ini NU menerapkan keberagaman moderasi beragama melalui fikih beradaban karena memiliki pengaruh yang signifikan dan berperan penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa terutama pondok pesantren.

Namun dinamika permasalahan keagamaan disaat ini terkadang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik antar komunitas, antar umat beragama, bahkan antar umat beragama. Oleh karena itu, NU dalam melaksankan halaqah peradaban dengan membekali pentingnya moderasi bergama dalam mengembangkan sikap berbangsa dan bernegara dengan menjaga kerukunan bangsa,Perjelasan diatas selaras dengan yang disampaikan salah satu pengurus PBNU KH Mahbub Maafi

Indonesia negara majemuk dan multicultural dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta negara yang agamis, meskipun tidak berdasarkan agama tertentu, yang paling penting untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia saat ini agar berjalan masyarakat yang teloran

Pernyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya moderasi beragama di Indonesia, negara yang majemuk dengan banyak suku, bahasa, budaya, dan agama. Indonesia, negara yang agamis tetapi tidak terikat pada agama tertentu, membutuhkan pendekatan yang inklusif untuk menjaga harmoni sosial. prinsip dasar moderasi beragama membantu mengurangi kemungkinan konflik kelompok dan mendorong sikap saling menghormati. Ini menciptakan landasan untuk masyarakat yang toleran di mana perbedaan dihargai sebagai kekayaan daripada ancaman. Moderasi beragama merupakan konsep yang mengedepankan sikap saling menghormati dan toleransi antar kelompok agama yang berbeda. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak memilih dan mengamalkan agamanya sendiri tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menggelar acara "Halaqoh Fiqih Peradaban di Pondok Pesantren Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Rakpesdam PBNU KH Uil Abshar Abdallah, Ketua RMI NU Jawa Barat KH Abdulrahman, Pengurus Pondok Pesantren, dan perwakilan dari berbagai Pondok Pesantren.Dia berharap halaqah ini dapat membuka pandangan baru tentang fiqih, mengontekstualkan, dan membedah ajaran-ajaran lama untuk diaplikasikan dalam peradaban masa depan wawasan keagamaan dan Kebangsaan

.Selain itu, tujuan halaqah ini adalah mengerakan ulama-ulama NU untuk berfikir reflektif dan sistematis dalam mendialogkan pemahaman keislaman yang diajarkan melalui kitab kuning dengan realitas peradaban saat ini serta untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan keagamaan yang seimbang. Dengan mempelajari ajaran-ajaran lama, peserta didorong untuk memahami Islam sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan satu sama lain serta dengan dunia di sekitar mereka. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, diharapkan akan terjadi

peradaban masa depan yang inklusif, harmonis, dan berkeadaban. Halaqah ini dapat menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang toleran, berdaya saing, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Fikih Peradaban yang dikembangkan Nahdlatul Ulama (NU) berakar pada prinsip tawassuth. Pendirian tersebut menjadi landasan respons NU terhadap berbagai permasalahan sosial, antara lain pluralisme, toleransi antar umat beragama, dan keadilan sosial, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini selaras dengan Keberhasilan dakwah Islam di nusantara juga erat kaitannya dengan sikap tawasuth yang diterjemahkan dengan sangat baik oleh Warisongo. Pendekatan Walisongo dalam mendakwahkan jalan hikmah sejalan dengan keteladanan Rasulullah.

Para wali memanfaatkan secara cerdas dan bijaksana segala sarana kehidupan masyarakat, baik kehidupan sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan (termasuk politik) untuk jalan dakwah. Sikap tersebut mendorong masyarakat nusantara untuk secara sadar masuk Islam tanpa paksaan atau intimidasi dari pihak berwenang. Sikap inilah yang kemudian dijadikan oleh Nahdlatul Ulama sebagai model atau aliran pemikiran dalam mengembangkan sayap dakwah di Indonesia

3. Aplikasi pengokohan Trilogi Ukhuwah (Islamiyah, Wathaniyah, Basyariyah) dalam berbangsa dan bernegara.

Indonesia terkenal dengan struktur sosial yang majemuk yang menjadi kebanggaan negara, meski kerap menimbulkan konflik sosial. Keadaan ini tidak terlepas dari masyarakat yang memiliki kesatuan sosial horizontal berdasarkan perbedaan suku, agama, agama, dan kewilayahan serta pembagian sosial vertikal antara golongan atas dan golongan miskin. Perbedaan tersebut dengan sendirinya tercermin dalam bentuk nilai dan norma yang diwujudkan melalui praktik kehidupan, sehingga

menghasilkan pola berpikir, bertindak, bertindak, dan berinteraksi antar kelompok yang berbeda. Secara empiris nilai-nilai dan norma-norma yang tertanam dalam masyarakat multikultural mempengaruhi komponen-komponen masyarakat majemuk dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam komunitas multikultural, masyarakat cenderung diasumsikan memiliki budaya mosaic. (H. Nurhayati & , Langlang Handayani, 2020)

Akhir-Akhir ini Indonesia saat ini menghadapi dilema yang mencerminkan sebuah potret rasa toleransi yang menipis rasa persuasi di antara masyarakatnya yang mulai individualis. Ini dapat menjadi akibat dari pengaruh kehidupan metropolis yang cenderung membuat bangsa ini egois dan individualis, atau mungkin karena budayanya yang menonjol, yaitu jiwa "bergotong royong", yang menggambarkan persaudaraan yang kuat dan ikatan kesatuan yang kuat.(Siregar, 2018)

Melalui Halaqah Fikih Peradaban yang diadakan oleh PBNU hadir menjadi ruang strategis untuk mempererat tali persaudaraan di berbagai tingkatan, baik dalam bidang agama, kebangsaan, dan kemanusiaan, khususnya dalam konteks berbangsann dan bernegara. hal ini sejalan apa yang disampaikan satu Pengurus PBNU KH Mahbub Maafi

" *Dalam Halaqah fikih peradaban beberapa tema yang dibahas misal ada kebangsaan, kegamaan, sosial, ekonomi dll , kegiatan ini mengumpulkan banyak orang jadi ya bisa memperkuat persaudaraan Islmiyah, Basyariyah dan Wathaniyah*.

Halaqah fikih peradaban yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) di pesantren memiliki tujuan strategis untuk mendukung trilogi persaudaraan: ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan). Halaqah ini menjadi wadah untuk menyatukan pemahaman keislaman yang inklusif, yang mengutamakan solidaritas di antara umat Islam dan

menghormati keberagaman bangsa dan manusia. Sebagai dasar pendidikan Islam tradisional, pesantren menjadi tempat yang sempurna untuk mengembangkan gagasan persaudaraan ini dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kasih sayang.

Forum ini memungkinkan para ulama, santri, dan masyarakat untuk membangun pemahaman bersama yang lebih inklusif dan toleran. Halaqah menekankan prinsip Ukhwah Islamiyah melalui eksplorasi ajaran Islam yang menghargai perbedaan aliran dan pandangan guna mempererat tali silaturahmi antar umat Islam. Pendekatan ini menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan umat Islam dalam mengatasi tantangan global seperti ekstremisme dan ketidakadilan sosial.

Selain itu, halaqoh juga berperan penting dalam memperkuat ukwa wataniya dan ukwa bahariya. Halaka mendorong peserta untuk menjadi agen kerukunan dalam masyarakat majemuk dengan mengatasi isu-isu relevan seperti keadilan sosial, toleransi antaragama, dan perdamaian. Hal ini tidak hanya menjaga integritas nasional tetapi juga menciptakan persatuan lintas batas agama dan etnis. Melalui diskusi berdasarkan nilai-nilai Islam yang moderat, halaqa membangun persaudaraan yang kuat berdasarkan cinta dan keadilan serta menjadi wadah untuk mempersatukan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam halaqah ini, santri dan ulama diajak untuk memahami fikih secara kontekstual, menjawab tantangan zaman dengan tetap menghormati nilai-nilai syariat dan kearifan lokal. Dengan menggali kajian Islam yang ramah dan moderat, halaqah mendorong rasa persatuan di antara sesama Muslim, memperkuat komitmen terhadap persatuan umat tanpa memandang perbedaan mazhab maupun pandangan.

Lebih jauh, halaqah juga menekankan pentingnya ukhuwah wathaniyah dengan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam diskusi,

isu-isu seperti pluralisme, toleransi, dan kebangsaan dibahas untuk memperkuat komitmen santri dalam menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, ukhuwah basyariyah ditegakkan melalui pandangan fikih yang mendukung perdamaian global, menolak diskriminasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, halaqah tidak hanya melahirkan pemikiran yang moderat, tetapi juga membangun generasi santri yang menjadi penggerak perdamaian dan persatuan di berbagai lapisan masyarakat.

Halaqah yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini merupakan progam NU strategis yang mencakup aspek keagamaan, sosial, politik , kebangsaan, dan yang dapat mempererat tali persaudaraan di berbagai tingkatan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, halakha ini berfungsi sebagai wadah untuk membangun pemahaman yang inklusif dan moderat, sehingga mempererat hubungan antar individu dan kelompok dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kegiatan ini membantu menyiarkan nilai-nilai Islam yang mederat tanpa kehilangan inti ajarannya dengan mengatasi isu-isu relevan seperti kebangsaan, agama, sosial dan ekonomi.

Hal sejalan dengan yang disampaikan oleh Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori di Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Islah, Kadilangu salah satu tujuan digelarnya Halaqoh Fiqih Peradaban merupakan salah satu strategi penguatan Jamaah dan Jam'iyyah. Selain itu, halaqoh Fiqih peradaban sangat penting untuk mempersatukan umat Kiai, dan Ibu Nyai ,santri, mayarakat ikut serta sebagai pemimpin di organisasi NU. Disitulah letak pentingnya sinergi antara masyarakat dan Jam'iyyah.(NU Online, 2022)

4. Menyiarkan dakwah Islam yang Toleran Melalui Halaqah Fikih Peradaban

Toleransi tidak hanya dalam beragama, toleransi juga bisa dilakukan dalam hal-hal lain seperti toleransi dalam

pendidikan, toleransi dalam ekonomi, toleransi dalam kebudayaan dan lain sebagainya (Bakar & Hurmain, 2016)

NU terdepan dalam menanamkan Nilai-Nilai Rahmatan Lil Alamin dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi yang menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga Mengajarkan sikap sikap saling pengertian dalam membangun sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan mengutamakan dialog dalam penyelesaian perbedaan pendapat. Sikap ini sangat penting, apalagi di negara Indoenesia ini terkenal dengan multikultural dimana keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa merupakan bagian dari jati diri bangsa

Islam, agama Rahmatan Lil Alamin, tentu saja mendorong umatnya untuk selalu menjaga keharmonisan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa, termasuk kehidupan beragama. Kata Islam ``Tasamuh'' yang berarti ``toleransi'' merupakan kata yang dekat dengan kerukunan umat beragama. Konsep toleransi beragama dalam Islam tidak membenarkan ajaran dan keyakinan semua agama yang ada, karena merupakan soal keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh seluruh umat Islam. Toleransi antar umat beragama hanya berdampak pada ranah sosial, yaitu pengakuan terhadap keberagaman keyakinan dan kepercayaan yang ada di masyarakat, serta tidak saling mengganggu dalam kaitannya dengan keyakinan, aktivitas, tata cara, dan ritual ibadah keagamaan.(Mohd Nazmi et al., 2020)

Pada dasarnya, sebagai orang beragama, manusia menginginkan kedamaian. Toleransi diajarkan dalam semua agama. Sebagian dari hasil menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan perdamaian dan kerukunan. Islam menawarkan ide tentang toleransi terhadap perbedaan yang dikenal sebagai tasamuh. Ini karena di dalam tasamuh

terdapat nilai kasih (rahmat), kebijaksanaan (hikmat), keadilan (adl), dan kemaslahatan universal. Dalam konteks ini, teologi, sosiolog, dan budaya adalah tiga dimensi yang memeriksa toleransi. Toleransi diharapkan memungkinkan orang untuk menerima keragaman, termasuk keragaman agama. Konsep dialog agama, selain toleransi dan pluralisme, juga berkontribusi pada pembentukan kerukunan tersebut. Ini terbukti dengan teladan Islam tentang Muhammad Saw sebagai rosul di Madinah, yang melindungi setiap warganya, baik muslim maupun non-muslim, dari musuh mereka, yang menghasilkan piagam Madinah.(Ghazali, 2016)

Dengan menggunakan pendekatan ini Melalui Halaqahh beradaban , Nahdlatul Ulama tidak hanya berhasil membangun dialog antara agama, tetapi juga memperkuat semangat kebangsaan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi dalam Fikih Peradaban menjadi pilar penting untuk membangun masyarakat yang damai dan saling menghargai, Hal ini disampaikan oleh Pengurus Pondok Pesantren Al Ihyaumaddin KH. Muharir .

" *Halaqah Fikih peradaban yang diselanggarakan oleh NU memberikan kontribusi yang pengaruh luar biasa kepada pondok pesantren kami terutama Kiai, Santri dan Masyarakat sehingga menjadi santri santri yang bisa mengalisa hukum fikih kontemporer secara bijak dan toleran dalam mengahadapi zaman, zaman kan selalu berubah.*

Halaqah Fikih Peradaban yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Ihyaulumaddin memberikan pengaruh positif dalam pola pikir dan keilmuan Kiai, santri, dan peserta halaqah. Halqah ini memungkinkan para peserta untuk lebih memahami dan mengkaji hukum fikih kontemporer melalui pendekatan kontekstual.

Kegiatan ini membantu santri menghadapi dinamika zaman sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan dunia saat ini sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai

syariat Islam. Para santri dilatih untuk menjadi orang yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman karena mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari masalah global seperti keadilan, sosial, dan toleransi.

Halaqoh ini juga membantu orang lebih memahami betapa pentingnya toleransi dan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi halaqah membangun kesadaran kolektif untuk menyelesaikan masalah umat secara damai dan berdasarkan prinsip "maslahah". Para santri dididik untuk tidak hanya menjadi tindakan tetapi juga menjadi pemimpin yang mampu mengatasi perbedaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, halaqah ini menghasilkan generasi santri yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter, sehingga mereka dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penarapan Halaqah dipraktikkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dengan menggunakan pendekatan Fikih Peradaban, yaitu sebuah cara berpikir tentang hukum Islam yang kontekstual, moderat, dan relevan dengan berbagai aspek masyarakat Indonesia. Melalui fikih ini, NU berusaha menjadikan toleransi sebagai prinsip utama dalam membangun harmoni antarumat beragama baik di tingkat lokal maupun internasional.

5. Meneguhkan Nilai-Nilai Pancasila dan Kebhinekaaan

Sebagai dasar ideologi negara Indonesia, Pancasila telah menjadi pilar penting dalam pembentukan dan pengaturan kehidupan berbangsa. Hal ini dibuktikan dengan posisinya yang dikenal luas dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 dan berperan besar dalam membentuk sistem hukum, pemerintahan, dan nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan nasional Indonesia Selain itu Pancasila menjadi dasar penegakan hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh penduduk nusantara.(Unggul et al., 2020) Untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia, Pancasila dipilih sebagai dasar negara, karena di dalamnya terdapat

Sebagai lembaga Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki tanggung jawab strategis untuk menegakkan prinsip rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta alam) dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila. NU serta menjalankan organisasi yang berakar pada tradisi keislaman moderat yang melihat Pancasila sebagai ekspresi dari nilai-nilai Islam yang universal selain sebagai dasar negara. Untuk melaksanakan sila pertama dan ketiga Pancasila, NU terus mendukung persatuan dalam keberagaman dengan menerapkan pendekatan inklusif.

Sebagai organisasi Islam yang berbasis pada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep rahmatan lil ‘alamin, atau Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. NU berkomitmen untuk menyebarkan Islam yang moderat, inklusif, dan membawa kebaikan bagi semua makhluk tanpa memandang jenisnya. Konsep ini diwujudkan melalui dakwah yang menekankan prinsip-prinsip kasih sayang, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Selain itu, NU secara aktif mendorong harmoni antarumat beragama dengan membangun dialog antara agama, menegaskan bahwa Islam adalah cara untuk mewujudkan kedamaian dan keseimbangan di dunia. Hal ini sesuai denga napa yang disampaikan oleh pengurus NU

“ Pancasila sebagai Idoelogi bangsa Indonesia tidak bertentangan dengan nilai nilai islam sebenarnya nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dipesanten mulai sila satu sampai lima.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia selaras dengan nilai-nilai Islam sebagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila konsisten dengan ajaran Islam yang universal. Sila pertama, “iman kepada satu Tuhan,”

mencerminkan keyakinan akan keesaan Tuhan yang menjadi inti ajaran tauhid Islam. Nilai-nilai tersebut diamalkan di pesantren melalui kajian Aqidah dan doa, dimana santri diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Begitu pula dengan perintah-perintah lain seperti "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan "persatuan Indonesia" yang sejalan dengan konsep Islam tentang ukwa insaniyah (persaudaraan umat manusia) dan ukwa wataniyah (persaudaraan bangsa-bangsa).

Di pesantren, implementasi nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," misalnya, tercermin dalam semangat gotong-royong dan kebersamaan yang dibangun antara santri, kiai, dan masyarakat sekitar. Sila keempat dan kelima, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," juga diajarkan melalui diskusi atau musyawarah yang melibatkan semua pihak untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Dengan demikian, pesantren menjadi tempat yang tidak hanya melahirkan individu yang religius, tetapi juga generasi yang memahami pentingnya menjaga harmoni antara nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

Kebhinekaan di pondok pesantren menjadi salah satu potret nyata dari keragaman Indonesia yang hidup dalam harmoni. Pesantren sebagai miniatur masyarakat majemuk sering kali dihuni oleh santri yang berasal dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan daerah. Meski berbeda-beda, kebersamaan dalam bingkai keislaman dan nilai-nilai universal seperti toleransi, saling menghormati, dan gotong-royong menjadi perekat utama. Para santri diajarkan untuk memahami bahwa perbedaan adalah sunnatullah (ketetapan Tuhan) yang harus disyukuri dan dijadikan kekuatan dalam membangun persatuan.

Melalui pendidikan dan tradisi pesantren, kebhinekaan dipraktikkan dalam berbagai aktivitas sehari-

hari. Misalnya, saat menjalani kehidupan asrama, para santri belajar hidup bersama dengan semangat persaudaraan tanpa memandang asal-usul. Diskusi dan pembelajaran juga sering kali menyentuh tema-tema yang menanamkan pentingnya menghargai perbedaan. Dengan cara ini, pesantren tidak hanya membentuk pribadi yang berakhlak mulia, tetapi juga melahirkan generasi yang mampu menjadi teladan dalam menjaga kebhinekaan sebagai kekuatan bangsa.

Satu langkah strategis PBNU dalam mengadakan Halaqah Fikih Peradaban di beberapa pondok pesantren. Ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Para santri, kiai, dan tokoh masyarakat diajak dalam halaqah ini untuk menggunakan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama untuk membahas berbagai masalah keagamaan dan sosial.

Didalam Pancasila mengandung nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini digunakan untuk membangun perspektif hukum Islam yang sesuai dengan kebhinekaan di Indonesia. Oleh karena itu, halaqah ini membantu orang lebih memahami keislaman dan memahami pentingnya menjaga harmoni dalam keberagaman.

Halaqah yang diselenggarakan oleh PBNU di berbagai pesantren memiliki peran penting dalam meneguhkan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan di Indonesia. Melalui forum diskusi ini, para kiai, santri, dan tokoh masyarakat diajak untuk mendalami dan mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kerangka beragama yang moderat dan inklusif. Dalam setiap halaqah, sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" diperkuat dengan pemahaman yang mendalam mengenai ajaran Islam yang menghargai perbedaan keyakinan. Selain itu, sila-sila lain seperti "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" serta "Persatuan Indonesia" ditekankan sebagai landasan penting untuk

membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghormati dalam keberagaman.

Pesantren sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran agama menjadi wadah yang ideal untuk memperkenalkan dan mengamalkan nilai-nilai kebhinekaan yang terkandung dalam Pancasila. Halaqah ini mengajarkan kepada santri untuk tidak hanya memahami hukum Islam, tetapi juga untuk menghargai perbedaan budaya, suku, dan agama yang ada di masyarakat Indonesia. Dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, pesantren mendidik santri untuk hidup dalam persatuan meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Diskusi dalam halaqah ini juga menanamkan pentingnya toleransi dan kerja sama antarumat beragama, yang merupakan bagian dari upaya menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat integrasi bangsa dalam kerangka Pancasila dan kebhinekaan.

BAB VII

PENERAPAN TRADISI HALAQAH FIQIH PERADABAN DALAM MENUMBUHKAN MODERASI BERAGAMA DI PONDOK PESANTREN

Penerapan tradisi Halaqah Fikih Peradaban di pondok

pesantren menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan moderasi beragama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Halaqah ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keislaman dengan nilai-nilai kebangsaan, seperti toleransi, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dengan pendekatan diskusi yang partisipatif, santri diajak untuk memahami dan mengimplementasikan konsep *maslahah* (kemaslahatan) dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam. Tradisi ini mengajarkan para santri untuk bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan agama dan budaya, sehingga tercipta harmoni sosial yang sesuai dengan sila pertama hingga kelima Pancasila.

Melalui Halaqah Fikih Peradaban, pondok pesantren juga mendidik santri agar mampu menjadi agen perubahan yang moderat dan berorientasi pada kebersamaan. Pendekatan ini mendorong santri untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan landasan ini, moderasi beragama tidak hanya dilihat sebagai nilai keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan. Tradisi halaqah di pesantren ini melahirkan generasi yang tidak hanya paham agama secara mendalam, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

A. Tradisi Halaqoh Fiqh Peradaban dilingkungan Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan di Indonesia memang memegang peranan penting dalam pembentukan tradisi intelektual yang kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Hal ini terlihat dalam tradisi halaqah fiqh peradaban yang sedang digalakkan oleh PBNU. Pesantren, sebagai lembaga yang menjaga tradisi, tidak hanya mengajarkan teks-teks klasik (kitab kuning) tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk pembahasan tentang moderasi beragama dan fiqh siyasah yang relevan dengan kondisi Indonesia yang multikultural dan pluralistik.(Nasruddin, 2022)

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di

indonesia yang yang saat ini sedang mengahapi perubahan dunia yang semakin kompleks. Untuk keberlangsungan eksistensi pesantren dituntut beradaptasi dengan kultur modernisasi seraya menjaga keorisinilan tradisi pesantren itu sendiri. (Faizun, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memang perlu dilakukan supaya pesantren tidak dianggap sebagai lembaga yang kolot, konservatif, tradisional, eksklusif dan pragmatis. Oleh sebab itu pesantren dikenal dengan lembaga pendidikan yang adaptif dengan zaman yang dihadapi. Hal ini diperkuat dengan selogan yang menjadi pegangan kuat *al muhafadzatu ala qadimi shalih wa akhdzu min jadidi ashlah* (menja tradisi lama yang baik seraya mengambi tradisi baru yang lebih baik). Hal ini supaya santri tidak hanya sebagai penonto atau objek perubahan, melainkan sebagai agent of change (transformator atau al mujaddid) secara utuh.

Pelaksanaan halaqoh fiqh peradaban wujud implementasi bahwa PBNU konsisten mengayomi pesantren pesantren untuk terus eksis pada zamannya tidak menutup mata terhadap isu isu konteporer. Halaqoh memang bukan bungkus baru didunia pesantren, bahwa sejak zaman Rasulullah tradisi halaqoh sudah berlangsung baik dalam Pengajaran maupun pemecahan sebuah masalah.

Halaqah yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di pesantren merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat dan relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui program ini, PBNU mengajak para santri, kiai, dan masyarakat sekitar pesantren untuk berdiskusi tentang berbagai isu kontemporer, termasuk masalah sosial, ekonomi, hingga politik, dalam bingkai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin. Halaqah ini tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga ajang pengembangan wawasan keislaman berbasis Fikih Peradaban, yang mendorong penerapan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Arrisalah KH. Rofiqil A’la

mengakatkan

Halaqoh Fiqh Peradaban menurut KH. Rofiqil A'la mengajak pengasuh ponpes, dan asatidz, tokoh Masyarakat, ajengan, agar kembali memikirkan tentang tanggung jawab besar yang dihadapi di tengah umat, dimana para ulama harus senantiasa mampu mengawal setiap permasalahan yang muncul di tengah-tengah umatnya. Menurut KH. Rofiqil A'la, Halaqah Fiqih Peradaban merupakan sebuah forum penting yang mengajak para pengasuh pondok pesantren, asatidz, tokoh masyarakat, dan ajengan untuk merenungkan kembali tanggung jawab besar mereka di tengah dinamika umat. Dalam halaqah ini, para ulama diharapkan tidak hanya menjadi rujukan keilmuan dalam memahami hukum Islam, tetapi juga mampu menjadi pengawal bagi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, halaqah ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran ulama sebagai penjaga moral dan pembimbing umat di tengah tantangan zaman.

Melalui Halaqah Fiqih Peradaban, diharapkan lahir panduan keagamaan yang kontekstual, moderat, dan berorientasi pada *maslahah* (kemaslahatan bersama). Forum ini juga bertujuan untuk menguatkan peran pesantren sebagai pusat pembelajaran yang tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga menanamkan tanggung jawab sosial dalam menciptakan harmoni dan keadilan di tengah masyarakat.hal ini sejalan dengan Munas PBNU lampung 1992 mencetuskan suatu rumusan yang luar biasa, dimana ulama NU tidak lagi bermazhab secara qauli tetapi bermazhab secara manhaji serta menghidupi ushul fiqh untuk mengkaji qaul para ulama.

Ketika ulama berkumpul saat itu dan mengkaji permasalahan umat, ulama menemukan suatu konsep baru, yang sebenarnya konsep itu kalau dikaji, akan ditemukan dalam buku-buku para ulama yang sezaman itu dan ulama beberapa tingkat diatasnya, yaitu konsep muwathanah atau kebangsaan. Diantaranya dalam kitab karangan Syekh

Muhammad al-Buthi berjudul Al Jihad fil Islam dan kitab karangan Prof. Wahbah az-Zuali yang berjudul Fiqh al-Islami.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menyampaikan beberapa alasan manusia membutuhkan peradaban menurut Ibnu Khaldun, seorang ulama yang mendapat julukan Bapak Sosiologi dalam Islam.Di dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyebut peradaban dengan istilah al-'umran al-baDi dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyebut peradaban dengan istilah al-'umran al-basyari. Istilah tersebut diungkap Ibnu Khaldun untuk merujuk pada makna peradaban, selain madaniyah. Al-'umran al-basyari bermakna meramaikan masyarakat. Sebab peradaban adalah tempat manusia tinggal atau menetap dan ramai karena saling beraktivitassyari.

Istilah tersebut diungkap Ibnu Khaldun untuk merujuk pada makna peradaban, selain madaniyah. Al-'umran al-basyari bermakna meramaikan masyarakat. Sebab peradaban adalah tempat manusia tinggal atau menetap dan ramai karena saling beraktivitas Di dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyebut peradaban dengan istilah al-'umran al-basyari. Istilah tersebut diungkap Ibnu Khaldun untuk merujuk pada makna peradaban, selain madaniyah. Al-'umran al-basyari bermakna meramaikan masyarakat. Sebab peradaban adalah tempat manusia tinggal atau menetap dan ramai karena saling beraktivitas.(NU Online, 2022)

Peradaban bagi Ibnu Khaldun identik dengan kota. Namun, kota yang dimaksud Ibnu Khaldun itu bukan kota yang ada di zaman modern seperti sekarang. Kota yang dimaksud adalah tempat manusia berkumpul, menetap, dan berkegiatan. Semakin tempat itu maju dan ramai dengan aktivitas manusia maka peradaban akan semakin maju.

"Peradaban hanya bisa lahir di kota, tempat manusia tinggal bareng kemudian membangun peradaban bersama," ungkap Gus Ulil, dalam Halaqah Fiqih Peradaban di Pondok

Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Sabtu (17/9/2022).

Menurut K.H. Dr. Hatim Gazali, MA. Halaqah Fiqh Peradaban bukan jenis fikih yang baru. Tetapi, cara baru terhadap fikih masa lalu dalam konteks sekarang dengan tetap menggunakan qaul dan manhaj ulama. Karena kalau hanya mengikuti pendapat-pendapat ulama, akan sulit menemukan hukum yang terkait keadaan kekinian. Halaqoh Fiqh Peradaban bukan pula tentang adab dalam arti akhlak-moral, sehingga memberi kesan orang yang mengerti fikih tidak beradab. Melainkan HFP menjadi bagian dari fikih muamalah yang didalamnya membahas posisi agama dalam negara, relasi antar agama terutama muslim dan kafir, juga terkait pedamaian dunia yang diupayakan PBB.

Tema tema yang diangkat dalam Halaqoh Fiqh Peradaban sangat memperlihatkan upaya penguatan nilai niai pancasila dan nmoderasi agama sejalan dengan apa yang telah digaungkan mentri agama. Dalam konteks Indonesia yang tidak menganut bentuk negara Islam, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dihadapkan dengan realitas masyarakat yang multikultural dengan beragam suku, ras, dan agama. Untuk mempertahankan keutuhan bangsa, sikap moderasi beragama atau wasathiyah dalam Bahasa Islamnya menjadi kebutuhan bersama. Prof. Quraish Shihab dalam acara halaqah Fikih Peradaban yang diselenggarakan di Ponpes Darus Sunnah Ciputat mengatakan bahwa wasathiyah itu tidak sekadar persoalan sikap, namun harus dilandari makrifat. Maka dengan kacama mata kewarga negaraan tidak pantas mendikotomi hanya soal agama ras dan suku budaya.

B. Penerapan Halaqah Fiqh Peradaban PBNU

Penerapan halaqah fiqh peradaban menurut KH Mahbub Maafi, seorang pemikir dan aktivis Islam yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh dalam gerakan moderasi beragama, adalah untuk:

a. Membentuk Pemahaman Islam yang Kontekstual dan Moderat

Halaqah fiqh peradaban bertujuan untuk membantu peserta memahami ajaran Islam dalam konteks zaman sekarang. Dalam dunia yang terus berkembang, pemahaman yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sosial, budaya, dan politik sangat penting. Hal ini agar ajaran Islam dapat diterima dan relevan dalam menghadapi tantangan modern, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama.

b. Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama:

Salah satu tujuan utama halaqah fiqh peradaban adalah untuk menanamkan nilai-nilai **moderasi beragama** yang menghindari ekstremisme dan intoleransi. Ulil Absar Abdallah sering mengingatkan pentingnya mengambil jalan tengah dalam beragama, yang menekankan pada kasih sayang, kedamaian, dan penerimaan terhadap perbedaan.

c. Mendorong Kemandirian Berpikir dalam Menghadapi Isu-isu Keagamaan:

Ulil menginginkan agar peserta halaqah tidak hanya mengikuti ajaran agama secara tekstual, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis dan mandiri dalam memahami ajaran Islam. Hal ini membantu mereka untuk mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

d. Membina Dialog Antaragama dan Antarbudaya:

Halaqah fiqh peradaban juga bertujuan untuk mengajak umat Islam untuk membuka diri terhadap dialog antaragama dan antarbudaya. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan kerukunan dan saling pengertian di tengah masyarakat yang plural.

e. Membangun Peradaban yang Berkeadilan dan Berkemajuan:

Tujuan jangka panjang dari halaqah fiqh peradaban adalah untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju dan **berkeadilan**, yang memperhatikan kesejahteraan

umat manusia secara keseluruhan. Hal ini mencakup kontribusi terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan politik yang berpihak pada keadilan dan kemaslahatan umat.

C. Penerapan Nilai Nilai Moderasi Agama dalam Halaqoh Kebangsaan

Diantara implementasi tujuan halaqoh fiqh peradaban yakni pembaharuan fiqh mengenai hubungan antara muslim dan non muslim. pada masa Turki Usmani adalah pembagian kelas warga negara. Muslim menjadi kelas pertama sementara kafir diklasifikasi dalam dua keadaan. Jika tergolong kafir harbi, yaitu kaum kafir diluar wilayah islam yang mau memerangi wilayah islam, maka tidak salah apabila dalam kitab kuning dijelaskan ada ganimah dan ada harta fai'. Harta fa'i merupakan harta yang diperoleh dari kalangan kafir harbi. Bahwa kalau ketemu orang kafir di pinggir jalan yang membawa kendaraan yang lebih bagus maka muslim boleh mengambilnya. Dijelaskan pula bahwa bangunan orang kafir juga tidak boleh lebih tinggi. Ini lahir dalam peradaban lama sebelum adanya negara bangsa.

Merujuk hasil musyawarah nasional Nahdlatul ulama yang tak lain merupakan forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU yang merupakan sebuah pertemuan atau permusyawaratan tertinggi diadakan oleh pimpinan pusat NU, bahwa penyebutan kafir pada masa kini sudah tidak relefan melainkan penyebutannya menggunakan istilah muslim dan non muslim. Hasil musyawarah isi keputusan musyarah berbunyi "Dalam Sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa, dalam bahasa arabnya Muwatonah tidak dikenal istilah kafir. Maka, setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama dimata konstitusi. Istilah kafir berlaku ketika Nabi Muhammad di Mekkah tapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Kota Madinah tidak ada istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non-Muslim. Ada tiga suku non-Muslim: suku Bani Qoinuqo, Bani Quraizah, dan Bani Nadirdisebut non-Muslim, tidak disebut kafir."**(Fitriani, 2019)**

Tema tema yang diangkat dalam Halaqoh Fiqh Peradaban sangat memperlihatkan upaya penguatan nilai niai pancasila dan nmoderasi agama sejalan dengan apa yang telah digaungkan mentri agama.

Dalam konteks Indonesia yang tidak menganut bentuk negara Islam, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dihadapkan dengan realitas masyarakat yang multikultural dengan beragam suku, ras, dan agama. Untuk mempertahankan keutuhan bangsa, sikap moderasi beragama atau wasathiyah dalam Bahasa Islamnya menjadi kebutuhan bersama. Prof. Quraish Shihab dalam acara halaqah Fikih Peradaban yang diselenggarakan di Ponpes Darus Sunnah Ciputat mengatakan bahwa wasathiyah itu tidak sekadar persoalan sikap, namun harus dilandari makrifat. Maka dengan kacammata kewarga negaraan tidak pantas mendikotomi hanya soal agama ras dan suku budaya.

Mempertanyakan seberapa jauh pemahaman peserta Halaqoh terhadap Moderasi agama Dalam wawancara dengan KH Dr. Rofiqul A'la, M.Pd yang dilaksanakan 16 Oktober 2024., beliau menjelaskan bahwa program halaqah fiqh peradaban yang dilaksanakan di pesantren-pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta memahami konsep moderasi beragama. Menurut beliau, halaqah fiqh peradaban ini terbukti efektif dalam menanamkan pemahaman tentang moderasi beragama pada peserta, sehingga mereka dapat mengamalkan ajaran agama dengan cara yang seimbang dan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. "

"Dalam proses pembelajaran halaqah, diskusi antara guru dan peserta berjalan dengan sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme peserta yang sangat tinggi, yang tidak hanya sekadar menyimak, tetapi juga aktif melontarkan pertanyaan serta menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh sesama peserta. Menurut KH Dr. Rofiqul A'la, keterlibatan aktif peserta dalam diskusi ini menunjukkan bahwa mereka semakin kritis dalam memahami dan menyikapi isu-isu keagamaan serta peradaban yang berkembang."

"Pentingnya halaqah fiqh peradaban, menurut beliau, adalah untuk mengajak peserta lebih mendalam dalam memahami ajaran agama secara moderat, yang tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keislaman yang benar."

Dalam tradisi pesantren, kiai memegang peran yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di pesantren. Oleh karena itu dapat dipahami jika kiai atau yang memegang tampuk kepemimpinan di pesantren memiliki paradigma berpikir yang berorientasi pada sikap moderasi, maka kurikulum pesantren juga akan dibangun dengan kultur moderasi. Hal ini menjadi mungkin, karena kiai adalah pemegang otoritas keilmuan dan tradisi kepesantrenan. Apalagi didukung dengan kepercayaan orang tua santri sehingga kiai memiliki otoritas pedagogis untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan, termasuk nilai-nilai luhur dan akhlak terpuji kepada santri-santrinya. Melalui kultur kepesantrenan seperti pengajian, pendisiplinan, pembiasaan, serta kontrol secara kontinu menjadi langkah yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai, termasuk moderasi beragama kepada para santri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan halaqah Fikih peradaban dengan melibatkan peran kiai dan bu nyai pesantren memberikan kontribusi positif terhadap penguatan nilainilai moderasi beragam di lingkungan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Haedari, et al., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global* (Cet. I; Jakarta: IRD Press, 2004), hal. 3.

Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 6.

Abdullah, A. F. A., & Rahman, M. H. (2024). *Kontribusi Nahdlatul Ulama terhadap Eksistensi Pendidikan di Indonesia 1929-1973*. *2*(1), 281–300.

Ahmad Ainun Najib. (2020). Konsep Dasar Pendidikan Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy'ari. *Al Ulya : Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(1), 67–80. https://doi.org/10.36840/ulya.v5i1.244

Ahmad Sanusi, A., & Mohd Yusof, I. (2018). Konsep rahmatan lil alamin dalam hadith: penerokaan makna serta aplikasi di Malaysia. *Journal Of Hadith Studies*, *3*(1 (2)), 331–334.

Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah*, *12*(2), 169–186. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376

Aulia Khoirunni aa' Qosiimah, Renaya Felisha, Erika Ananda, Wismanto Wismanto, & Ilham Hudi. (2024). Wujud Rahmatan Lil Alamin Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, *2*(2), 01–13. https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.64

Azikin, A. (2018). Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 77–90. https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1098

Bakar, A., & Hurmain. (2016). KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA; Telaah atas Piagam Madinah dan Relevansinya bagi Indonesia Abu. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, *8*(2), 213. file:///D:/S2/Semester 1/Moderasi Beragama/referensi artikel/12. Kerukunan Antarumat Beragama Telaah atas Piagam Madinah dan Relevansinya bagi Indonesia.pdf

Budiyanti, N., Aziz, A. A., Suhartini, A., Ahmad, N., & Prayoga, A. (2020). Konsep Manusia Ideal: Tinjauan Teologis Dan Pendidikan Islam. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(2). https://doi.org/10.24235/tarbawi.v5i2.6962

Chalik, A. (2011). *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik*. Impulse & Buku Pintar Yogyakarta.

Demokrasi, P. (2019). *Persatuan Indonesia Dalam Terang Dokumen*. *35*(3), 279–300.

Farih, A. (2016). Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri). *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *24*(2), 251. https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969

Ghazali, A. M. (2016). Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam. *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, *1*(1), 25–40.

Hambali, H. &. (2018). Transformasi NU di Indonesia: Upaya Menghilangkan Polemik di Tengah Perubahan Politik. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *20*(1), 35. https://doi.org/10.22373/substantia.v20i1.3404

Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(1), 6–12. https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439

Idrus, M. (2022). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Penerbit Cv. Eureka Media Aksara. *Pendidikan Pancasila Untuk*, 245.

Irmayanti, A. P., Zulheldi, Z., Samad, D., Syamsi, S., & Maulana, F.

(2024). Urgensi Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah dalam Pendidikan Agama Islam. *Ta Dib Jurnal Pendidikan Islam*, *13*(1), 59–68. https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i1.13289

Ivan Fauzi. (2019). Kepemimpinan Perspektif Pendidikan Islam. *Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, *14*(1), 1–21.

Kaderi, A. (2015). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. *Pendidikan Pancasila*, 115.

Karyanto, U. B. (2017). Pendidikan Karakter: Sebuah Visi Islam Rahmatan Lil Alamin. *Edukasia Islamika*, *2*(2), 191. https://doi.org/10.28918/jei.v2i2.1668

Khosiin, K., Tobroni, T., & Khozin, K. (2023). The Rahmatan Lil-'Alamin Paradigm as an Islamic Approach to Islamic Education in Muhammadiyah Schools. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, *12*(01), 153–166. https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i01.29382

Machali, I., & Fauzi, A. (2020). *Ke-NU-An, Ahlussunah Waljama'ah An-Nahdliyyah*. 154. http://dx.doi.org/10.31237/osf.io/a823b

Mohd Nazmi, M. K., Suraya, S., & Syamsul Azizul, M. (2020). Rahmatan Lil 'Alamin: Kerangka Konsep Keharmonian di Malaysia. *Sains*

Insani, *5*(2), 32–42.

Mubin, F. (2020). Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia. *Fatkhulmubin90@Gmail.Com*, *3*(1), 1–15.

Multidisiplin, J. I. (2024). *PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MENJAGA UKHUWAH ISLAMIYAH PADA BIDANG SOSIAL-AGAMA*. *1*(6), 15–24.

Mutaqin, M. I. (2023). Konsep Anti Kekerasan Perspektif Al- Qur ' an dan Bibel. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(4), 1616–1625.

Nasir, M., & Qomariya, N. (2021). Toleransi Beragama Dalam Hadis Nabi. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an …*, *4*(2), 244–258. http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/221%0Ahttp://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/download/221/99

Nasruddin, M. (2022). Halaqah Fikih Peradaban Dan Relevansinya Terhadap Penguatan Nilai Moderasi Beragama Di Pesantren. *Pesantren Studies Annual Symposium on Pesantren Studies (Ansops) 2022 Prosiding Nasional Vol. 01 2022 e ISSN: 2746-1238*, *01*, 2–14.

Nasrullah, Bahaking Rama, A. A. (2023). Nahdlatul ulama, tokoh dan

kegiatannya dalam dunia pendidikan. *Nizam: Jurnal Islampedia*, *6094*, 21–28.

Nur Khalik, R., & Ali, U. (2023). *Ikhtisar Sejarah NU 1344 H/1926 M* (Pertama). LTN NU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Nurhayati, D. A., & Ambari. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *8*(2), 177–185.

Nurhayati, H., & , Langlang Handayani, N. W. (2020). Jurnal basicedu. Jurnal Basicedu,. *Jurnal Basicedu*, *5*(5), 3(2), 524–532. https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/971

Nurlaili, Millah, C. U., & Nasution, E. M. (2024). Moderasi Beragama di Indonesia: Konsep Dasar dan Pengaruhnya. *Moderation : Journal of Religious Harmony*, *1*(1), 9–14.

Perspektif, I., Hasyim, K. H., & Ari, A. S. Y. (2022). *Hasyim Asy'ari; Persaudaraan; Toleransi*. *18*(02).

Prathama, P. A., & Mahadwistha, M. Z. (2024). Studi Fenomenologi: Konsep Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *2*(3), 339–352.

Rahma, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-Hari.

Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, *18*(1), 64. https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jurpis/article/view/1089

Rahmatika, A., & Khoirullina, N. (2020). Upaya Meneguhkan Islam Rahmatan Lil'alamin Melalui Majalah Bangkit. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, *5*(2), 191. https://doi.org/10.29240/jdk.v5i2.2155

Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif Kh. Hasyim Muzadi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, *11*(1), 93–116. https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116

Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pegimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(2), 2630–2633.

Rosyidi, M. F. A. A. (2019). KONSEP TOLERANSI DALAM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DI MASYARAKAT INDONESIA Mohammad Fuad Al Amin Mohammad Rosyidi 1. *Jurnal Madaniyah*, *9*(3), 277–296.

Sabri, Mohammad, D. (2020). *SIGMA PANCASILA : Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan* (P. Balun (ed.); Edisi Pert). Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Salim, M. (2017). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. *Al Daulah : Jurnal Hukum*

Pidana Dan Ketatanegaraan, *6*(1), 65–74. https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866

Santoso, G., Aulia, A. N., Indah, B. S. N., Lestari, D. P., Ramadhani, F. F., Alifa, H., & Mahya, A. F. P. (2023). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia Dari Dahulu Sampai Sekarang. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, *02*(02), 183–194.

Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, *7*(1), 53–58. https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445

Senja Tiarylla, D., Untsa Azhima, L., & Saputri, Y. A. (2023). Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia. *Ingineous Knowledge*, *2*(4), 277–283.

Sholikhah, M., Putri, N. A., & Wahyuningjati, R. (2023). *Peran Pancasila dalam Antisipasi Permasalahan Bangsa*. *2*(6), 440–446.

Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Terhadap Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 1–9. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3290

Siregar, K. I. (2018). Konsep Persaudaraan Sebagai Profetik Sunnah

dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, *14*(2), 161–174. https://doi.org/10.21009/jsq.014.2.05

Sjech, U. I. N., Djambek, M. D., Sjech, U. I. N., Djambek, M. D., Sjech, U. I. N., & Djambek, M. D. (2024). *Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Jesika Indriani Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republic sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan masyarakatnya tidak asing l*. *4*.

Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective. *Jurnal Konstitusi*, *12*(4), 853–854.

Susilawati, S. (2020). Pancasila Sebagai Solusi Problem Bangsa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *20*(2), 626. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.942

Taufikurrahman, Amin, M., Kurniawan, A., Hatibie, R., & Nasywaa, I. (2022). Islam Rahmatan Lil Alamin dan Keragaman Bangsa Indonesia. *Kabilah: Journal of Social Community*, *7*(1), 235–244.

Udin. (2020). *Implementasi Konsep Dakwah Rahmatan Lil Alamiin Dalam Dakwah Kontemporer*.

Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Unggul, A., Ajati, D., Saputra, R., & Fitriono, R. (2020). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, *1*(Pancasila), 1–12. http://satujam.com/pancasila-dan-lambangnya/

Warsita, B. (2017). Peran Dan Tantangan Profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran Pada Pembelajaran Abad 21. *Jurnal Kwangsan*, *5*(2), 14. https://doi.org/10.31800/jurnalkwangsan.v5i2.42

Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Sebagai negara hukum (rechtsstaat) Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Misalnya dari keragaman suku dan budaya melahirkan Hukum Adat. Dari segi agama kita kenal dengan Hukum Islam. Dan juga ada hukum.

Widiatama, *Widiatama Mahmud*, *Hadi Suparwi*, *Suparwi*, *3*(2), 310.

Zainal Arifin, M. U. (2020). *ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN 2*.

Zulham, Z., & Lubis, K. (2022). Islam Dan Toleransi. *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, *6*(2), 116. https://doi.org/10.30821/ansiru.v6i2.14649

Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta, Logos, 1994), 49

Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVII, (Bandung, Mizan, 1994), 65

BIOGRAFI PENULIS



Sartono, S.Pd.I,M.Pd.I. Lahir di Cilacap Jawa Tengah 25 Desember 1983, Pendidikan Formal di SD Negeri 1 Bulusari (1996), MTs Al Hidayah Batulicin (2000), Madrasah Aliyah Minat (2003), Gelar Sarjana S1 diperoleh di STIT Al Muslihuun Blitar Mengambil Program Studi Pendidikan Agama Islam (2009), Gelar Magister diperoleh di STAIN Tulungagung Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (2011), Sartono merupakan Dosen Tetap STAI Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar Sejak 2015-Sekarang Selain itu juga sambil mengajar di SMA YaBAKII 2 Gandrungmangu , Kesehariaannya aktif didunia pendidikan, Pengabdian , Penelitan. Sekarang di percaya oleh STAI Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.



Ahmad Zulfi Fahmi, S.Pd.,M.Pd. Lahir di Ciamis Jawa Barat 03 September 1991, Gelar Sarjana S1 diperoleh di Universitas Sains Alquran Mengambil Program Studi Ilmu Pendidikan (2018), Gelar Magister di alamater yang sama Universitas Sains Alquran Program Studi Ilmu Pendidikan (2022), Dia merupakan Dosen Tetap STAI Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar Sejak 2022-Sekarang Selain itu juga sambil mengajar di SMP Miftahul Huda Al Azhar , Kesehariaannya aktif didunia pendidikan, Pengabdian , Penelitan. Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sejak 2023-Sampai Sekarang